Analisis Faktor-Faktor Potensial yang Mempengaruhi Persepsi Korupsi di Negara Asia Tenggara

SKRIPSI

Oleh:

Nama: Nurul Winanda

No. Mahasiswa: 20312131

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

Analisis Faktor-Faktor Potensial yang Mempengaruhi Persepsi Korupsi di Negara Asia Tenggara

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Nama : Nurul Winanda

No. Mahasiswa : 20312131

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku."

Yogyakarta, 14 Agustus 2024

Penulis,



(Nurul Winanda)

HALAMAN PENGESAHAN

Analisis Faktor-Faktor Potensial yang Mempengaruhi Persepsi Korupsi di Negara Asia Tenggara

SKRIPSI

Diajukan oleh:

Nurul Winanda

20312131

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 5 Agustus 2024

Dosen Pembimbing,



Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFrA, CertIPSAS

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Analisis Faktor-Faktor Potensial yang Mempengaruhi Persepsi Korupsi di Negara Asia Tenggara

Disusun oleh : NURUL WINANDA

Nomor Mahasiswa : 20312131

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Rabu, 04 September 2024

Penguji/Pembimbing Skripsi : Prof. Johan Arifin, M.Si., Ph.D., CFra.

Penguji : Dekar Urumsah, SE., S.Si., M.Com(IS)., Ph.D., CFra.



Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFrA, CertIPSAS.

HALAMAN MOTTO

“If you fail to plan, you are planning to fail”

-Benjamin Franklin

”The journey of a thousand miles begins with a single step”

-Lao Tzu

KATA PENGANTAR

بِسْـــــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh

Alhamdulillahirrabill'alamin, segala puji dan syukur untuk Allah SWT dengan segala rahmat dan karunia-Nya serta junjungan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Faktor-Faktor Potensial yang Mempengaruhi Persepsi Korupsi di Negara Asia Tenggara". Skripsi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat kelulusan Satrata satu program studi Akuntansi di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Maka dari itu melalui kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua peneliti yaitu Bapak Sudiman dan Ibu Hamidah yang selalu memotivasi penulis dengan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Saudara penulis, Rizky Budi Tyaswarman yang menemani, menghibur serta menjadi tempat cerita penulis selama menyusun skripsi ini.
3. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.,CFrA,CertIPSAS selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia serta Dosen Pembimbing penulis yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.

5. Bapak Dekar Urumsah, S.E., S.Si., M.Com.(IS)., Ph.D. CFrA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Rifqi Muhammad, S.E., S.H., M.Sc., Ph.D. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.
7. Semua Bapak/Ibu Dosen Jurusan Akuntansi serta pegawai dan staf yang secara langsung maupun tidak langsung membantu penulis dalam mendapatkan ilmu yang berguna.
8. Sahabat-sahabat penulis dalam perkuliahan, terutama dari "Creative Accounting" dan "*Girls Trip on TJ*" yang membantu, menemani dan menghibur penulis selama perkuliahan.

Terima kasih atas segala bantuan, doa, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis. Dengan kesadaran penuh, skripsi ini jauh dari kata sempurna. Semua kritik maupun saran yang diberikan kepada penulis akan diterima dengan rendah hati untuk menyempurnakan tugas akhir ini.

Yogyakarta, 5 Agustus 2024

Penulis,



Nurul Winanda

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME iii
HALAMAN PENGESAHAN iii
BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI v
HALAMAN MOTTO vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR GAMBAR xiii
ABSTRAK xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 6
1.3 Tujuan Penelitian 7
1.4 Manfaat Penelitian 7
1.5 Sistematika Pembahasan 8
BAB II KAJIAN PUSTAKA 10
2.1 Landasan Teori 10
2.1.1 Teori Agensi dan Korupsi 10
2.1.2 Indeks Persepsi Korupsi 11
2.1.3 *E-Government* 11
2.1.4 Indeks Kebebasan Pers 13
2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia 13
2.2 Penelitian Terdahulu 14
2.3 Pengembangan Hipotesis 16
2.3.1 Pengaruh peningkatan Indeks Infrastruktur Telekomunikasi terhadap Indeks Persepsi Korupsi 16
2.3.2 Pengaruh peningkatan Indeks Layanan Online terhadap Indeks Persepsi Korupsi 18
2.3.3 Pengaruh peningkatan Indeks Sumberdaya Manusia terhadap Indeks Persepsi Korupsi 19

2.3.4 Pengaruh peningkatan Indeks Kebebsasan Pers terhadap Indeks Persepsi Korupsi 20
2.3.5 Pengaruh peningkatan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Indeks Persepsi Korupsi 21
2.4 Kerangka Pemikiran 22
BAB III METODE PENELITIAN 24
3.1 Jenis Penelitian 24
3.2 Jenis dan Sumber Data 24
3.3 Definisi dan Pengukuran variabel 25
3.4 Analisis Data 27
3.4.1 Model Regresi Data Panel 27
3.4.1.1 *Common Effect Model* (CEM) 27
3.4.1.2 *Fixed Effect Model* (FEM) 27
3.4.1.3 *Random Effect Model* (REM) 28
3.4.2 Uji Estimasi Model 28
3.4.2.1 Uji Chow 28
3.4.2.2 Uji Hausman 29
3.4.2.3 Uji Lagrage-Multiplier (LM) 29
3.4.3 Uji Asumsi Klasik 30
3.4.3.1 Uji Multikolinearitas 30
3.4.3.2 Uji Heteroskedasitas 30
3.4.4 Uji Hipotesis 31
3.4.4.1 Uji T 31
3.4.4.2 Uji F 31
3.4.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R2) 32
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 33
4.1 Deskripsi Data Penelitian 33
4.2 Statistik Deskriptif Variabel 34
4.3 Model Regresi Data Panel 36
4.3.1 *Common Effect Model* (CEM) 36
4.3.2 *Fixed Effect Model* (FEM) 37
4.3.3 Random Effect Model (REM) 38
4.4 Uji Estimasi Model 39
4.4.1 Uji Chow 39

4.4.2 Uji Hausman 39
4.5 Uji Asumsi Klasik 39
4.5.1 Uji Multikolinearitas 39
4.5.2 Uji Heteroskedasitas 40
4.6 Uji Hipotesis 41
4.6.1 Uji t 41
4.6.2 Uji F 43
4.6.3 Uji Koefisien Determinasi (R2) 43
4.7 Pembahasan 44
4.7.1 Pengaruh Indeks Infrastruktur Telekomunikasi terhadap Indeks Persepsi Korupsi 44
4.7.2 Pengaruh Indeks Layanan Online terhadap Indeks Persepsi Korupsi 45
4.7.3 Pengaruh Indeks Sumber Daya Manusia terhadap Indeks Persepsi Korupsi 46
4.7.4 Pengaruh Indeks Kebebasan Pers terhadap Indeks Persepsi Korupsi 47
4.7.5 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Persepsi Korupsi 48
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 50
5.1 Kesimpulan 50
5.2 Keterbatasan Penelitian 51
5.3 Saran 52
DAFTAR PUSTAKA 53
LAMPIRAN 57

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....14

Tabel 4. 1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....34

Tabel 4. 2 Hasil CEM.....36

Tabel 4. 3 Hasil FEM.....37

Tabel 4. 4 Hasil REM.....38

Tabel 4. 5 Hasil Uji Chow.....39

Tabel 4. 6 Hasil Uji Hausman.....39

Tabel 4. 7 Hasil Uji Multikolinearitas.....39

Tabel 4. 8 Hasil Uji t.....41

Tabel 4. 9 Hasil Uji F.....43

Tabel 4. 10 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2).....43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....22

Gambar 4. 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas 40

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh Indeks Infrastruktur Telekomunikasi, Indeks Layanan *Online*, Indeks Sumber Daya Manusia, Indeks Kebebasan Pers dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap variabel dependen berupa Indeks Persepsi Korupsi di negara Asia Tenggara. Sampel penelitian terdiri dari 10 negara ASEAN dengan jumlah sampel *time-series* yang digunakan adalah 10 tahun dalam rentan periode 2004-2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan infrastruktur telekomunikasi, layanan *online* pemerintah, kebebasan pers dan pembangunan manusia tidak berpengaruh terhadap penurunan persepsi korupsi dan hanya variabel sumber daya manusia yang berpengaruh negatif signifikan terhadap persepsi korupsi di Asia Tenggara.

Kata kunci : Indeks Infrastruktur Telekomunikasi, Indeks Layanan *Online*, Indeks Sumber Daya Manusia, Indeks Kebebasan Pers, Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Persepsi Korupsi

ABSTRACT

This research aims to empirically test the influence of Telecommunication infrastructure index, Online Services Index, Human Resources Index, Press Freedom Index and Human Development Index on the dependent variable in the form of the Corruption Perception Index in Southeast Asian countries. The research sample consists of 10 ASEAN countries with the time-series sample size used being 10 years in the vulnerable period 2004-2022. The research results show that the development of telecommunications infrastructure, government online services, press freedom and human development have no effect on reducing perceptions of corruption and only human resource variables have a significant negative effect on perceptions of corruption in Southeast Asia.

Keywords : Telecommunication infrastructure index, Online Services Index, Human Resources Index, Press Freedom Index and Human Development Index Corruption Perception Index

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki negara tetangga yang juga dalam tahap negara berkembang. Namun, untuk bagian regional ASEAN yang terdiri dari 10 negara, berdasarkan data world bank pada tahun 2023 hanya terdapat 1 negara dengan Produk Domestik Bruto (PDB) perkapita tinggi yaitu Singapura. Sedangkan negara ASEAN lainnya seperti Indonesia, Malaysia, Kambodia, Filipina, Vietnam, Laos, Brunei Darussalam, Myanmar, Vietnam dan Thailand memiliki PDB perkapita dibawah rata-rata yang mana dapat disimpulkan bahwa wilayah regional ASEAN terdiri atas mayoritas negara berkembang. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang salah satunya adalah faktor *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik (Maria *et al*., 2017).

Salah satu indikator baik buruknya tata kelola suatu negara adalah tingkat korupsi, yang datanya diterbitkan oleh Transparency International melalui *Corruption Perceptions Index* (CPI). CPI digunakan sebagai alat pengukur global untuk menggambarkan tingkat korupsi yang dirasakan oleh warga negara dan pengusaha di suatu negara. *Corruption Preception* Index (CPI) di wilayah regional ASEAN sendiri menyatakan pada tahun 2023 terdapat setidaknya 9 dari 10 negaranya masih memiliki tingkat CPI yang rendah kecuali Singapura, karena Singapura mempunyai nilai CPI yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya.

Korupsi telah lama menjadi permasalahan serius di negara-negara berkembang, dengan dampak negatif yang luas pada pembangunan ekonomi, keadilan sosial, dan stabilitas politik (Park dan Kim, 2020). Selain mengakibatkan kerugian keuangan, korupsi juga dapat mencerminkan performa dan dapat memberikan kesan negatif terhadap pemerintah sehingga dapat mengakibatkan hilangnya rasa kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi tantangan korupsi, sudah seharusnya diadakannya upaya mengurangi dan memberantasnya. Salah satu aspek yang sangat dibutuhkan dan dapat dimanfaatkan yaitu aspek teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Menurut Rahman *et al*. (2020), penerapan *E-Government* yang pengembangannya dapat diukur dengan *E-Governement Development Index* (EGDI) telah dianggap sebagai salah satu solusi dari aspek TIK yang potensial untuk merefleksikan transparasi serta akuntabilitas sehingga dapat mengurangi kesempatan bagi pejabat pemerintahan untuk melakukan tindak korupsi yang dengan demikian diharapkan berkurangnya ketidakseimbangan informasi antar agen dan prinsipal.

Kawasan regional yang tegabung di ASEAN telah mengadopsi inisiatif *E-Government* dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengurangi praktik korupsi. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) memberikan indikasi tentang sejauh mana upaya pemerintah dalam mengatasi korupsi telah berhasil karena dengan adanya infrastruktur telekomunikasi yang baik, layanan pemerintah dapat diselenggarakan secara elektronik, yang mempercepat proses pelayanan dan meningkatkan transparansi. Akan tetapi,

penerapan *E-Government* sebagai alat anti korupsi mengalami berbagai macam rintangan terutama di negara yang masih berkembang. Tantangan tersebut salah satunya adalah pengembangan infrastruktur telekomunikasi yang belum dapat mencakup ke daerah terpencil. Walaupun wilayah ASEAN memiliki tingkat kepemilikan gawai yang cukup tinggi, namun seperti data yang didapat dari website statistica.com mengenai *Global Internet Penetration Rate* di tahun 2024, akses penggunaan Internet area wilayah ASEAN mencakup 71.5% dengan negara penerima akses terendah yaitu Kambodia, Laos dan Myanmar.

Penelitian sebelumnya mengenai dampak infrastruktur telekomunikasi terhadap penurunan tingkat indeks persepsi korupsi sudah dilakukan oleh Silal *et al*. (2023) yang menyatakan bahwa pengembangan infrastruktur telekomunikasi dapat memberikan dampak yang positif terhadap kontrol atas korupsi sehingga menurunkan indeks persepsi korupsi di negaranya.

Aspek EGDI yang tidak kalah pentingnya yaitu OSI atau *Online Service Index*. Dari aspek ini dapat diketahui sejauh mana instansi-instansi pemerintah dalam suatu negara telah memanfaatkan situs resmi sebagai saluran informasi bagi masyarakatnya. OSI memperhitungkan tingkat kematangan layanan TIK yang dapat diklasifikasikan menjadi empat fase yaitu fase informasi, interaksi, transaksi dan transformasi (Setyobudi dan Setyaningrum, 2019). Penelitian sebelumnya mengenai dampak layanan *online* yang disediakan oleh pemerintah terhadap persepsi korupsi telah diteliti oleh Nam (2018) menyatakan bahwa situs pemerintahan dapat meningkatkan

transparansi antar pemerintah dan warganya sehingga dapat mengurangi persepsi korupsi secara signifikan.

Dari ketersediaan layanan dan akses teknologi, aspek terpenting dari perkembangan *E-Government* adalah pengguna dan operatornya. Human Capital Indeks yang mengukur kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang terlatih dan profesional dapat memungkinkan pemerintah untuk mengelola teknologi informasi dengan lebih efektif, sehingga mengurangi kesempatan korupsi (Yuliyana dan Setyaningrum, 2016). Peneliti terdahulu, Silal *et al*. (2023) menemukan bahwa semakin bagus sumber daya manusia di suatu negara, maka dampaknya positif akan meningkatkan kontrol atas korupsi yang akan menurunkan indeks persepsi korupsi suatu negara.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang berjudul Examining the role of *E-Government* in controlling corruption: A longitudinal study Silal *et al*. (2023). Dari penelitian tersebut peneliti menambahkan Human Development Indeks dan *Press Freedom Index* sebagai variabel independen.

Penelitian mengenai hubungan *Press Freedom Index* dengan *Corruption Perception Index* sudah dilakukan oleh Ericson (2017) dan Flavin dan Montgomery (2020) menyatakan bahwa ketika kebebasan pers di suatu negara meningkat, hubungan antara persepsi warga tentang korupsi dan penilaian ahli negara tentang korupsi menjadi lebih kuat dan lebih jelas sehingga negara-negara dengan kebebasan pers yang lebih tinggi cenderung

memiliki masyarakat yang lebih aktif dalam mengekspos praktik-praktik korupsi dan menuntut akuntabilitas dari pejabat publik. Ini berarti bahwa kebebasan pers yang lebih besar memungkinkan warga untuk lebih menyadari dan lebih akurat menilai tingkat korupsi dalam pemerintahan, yang kemudian sejalan dengan penilaian ahli yang lebih terinformasi.

Penelitian mengenai hubungan *Human Development Index* dan *Corruption Perception Index* telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh Alves *et al*. (2017) dan Kurniawan *et al*. (2020) menunjukkan adanya hubungan kuat antar HDI dan CPI terutama di negara yang termasuk klasifikasi "*very high human development*". Penambahan variabel ini sejalan dengan teori agensi, dimana dengan sistem pemerintahan negara di ASEAN sering kali diwarnai oleh birokrasi yang rumit dan praktik korupsi yang merajalela, penerapan prinsip-prinsip teori agensi menjadi sangat penting. Dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta menyelaraskan insentif pejabat publik dengan kepentingan masyarakat, negara-negara ini dapat mengurangi ketidakpastian dan konflik kepentingan yang sering memicu korupsi. Pendekatan ini membutuhkan masyarakat yang terdidik dan sadar akan hak-haknya, yang hanya bisa tercapai melalui peningkatan IPM.

Penelitian ini melibatkan analisis data sekunder di negara-negara ASEAN. Data yang relevan akan dikumpulkan dari sumber-sumber seperti laporan resmi serta survei Perserikatan Bangsa-Bangsa, *World Bank*, *Transparency International* yang telah dilakukan sebelumnya. Analisis

statistik akan digunakan untuk menguji hubungan *Telecommunication infrastructure index, Online Service Index, Human Capital Indeks, Press Freedom Indeks, Human Development Index* terhadap IPK dalam konteks ASEAN.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti akan mengangkat judul "Analisis Faktor-Faktor Potensial yang Mempengaruhi Persepsi Korupsi di Negara Asia Tenggara" untuk dilakukan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor – faktor yang mempengaruhi aspek EGDI apa saja yang perlu diperhatikan dan faktor lain yang dapat mengurangi persepsi korupsi di ASEAN.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Indeks Infrastruktur Telekomunikasi (*Telecommunication infrastructure index* - TII) yang lebih baik akan menurunkan tingkat Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index* - CPI)?
2. Apakah Indeks Pelayanan *Online* (*Online Service Indeks* - OSI) yang lebih baik akan menurunkan tingkat Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index* - CPI)?
3. Apakah Indeks Sumber Daya Manusia (*Human Capital Index* - HCI) yang lebih baik akan menurunkan tingkat Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index* - CPI)?

4. Apakah Indeks Kebebasan Pers (*Press Freedom Index* - PFI) yang lebih baik akan menurunkan tingkat Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index* - CPI)?
5. Apakah peningkatan Pembangunan Manusia (*Human Development Indeks*- HDI) yang lebih baik akan menurunkan tingkat Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index* - CPI)?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

1. Untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh Indeks Infrastruktur Telekomunikasi (TII) terhadap Indeks Persepsi korupsi (CPI)
2. Untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh Indeks pelayanan *online* (OSI) terhadap Indeks Persepsi Korupsi (CPI)
3. Untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh Indeks Sumber Daya Manusia (HCI) terhadap Indeks Persepsi korupsi (CPI)
4. Untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh Indeks kebebasan pers terhadap Indeks Persepsi Korupsi (CPI)
5. Untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (HDI) terhadap Indeks Persepsi korupsi (CPI)

1.4 Manfaat Penelitian

Dari tujuan di atas, penelitian ini diharap bisa memberi manfaat untuk pihak – pihak yang memiliki kepentingan, antara lain:

1. Bagi Mahasiswa

   Menambah wawasan ilmu pengetahuan sektor publik tentang pengaruh aspek teknologi dan pemerintah.

2. Bagi Pemerintah

   Dapat memberikan pandangan penerapan *E-Government* dari aspek mana yang perlu ditingkatkan serta diharapkan bahwa pemerintah akan lebih perduli terhadap perkembangan dan penggunaan situs resminya untuk memberikan informasi

3. Bagi Masyarakat

   Masyarakat dapat mengetahui dan memahami pentingnya transparansi informasi pada website resmi pemerintah.

1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika penyusunan penelitian ini akan disusun dalam lima bab yang berkesinambungan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini berisi pengantar yang menyajikan konteks latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan susunan struktur dalam penyajian penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bagian ini menguraikan secara mendetail tentang teori-teori dasar yang menjadi fondasi untuk mengembangkan hipotesis penelitian,

diikuti oleh tinjauan literatur awal, rangkaian logika penelitian, dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bagian ini akan menguraikan secara rinci tahapan penelitian dan detail elemen-elemen penelitian yang mencakup rencana penelitian, populasi dan sampel yang diteliti, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bagian ini mengandung inti dari penelitian, di mana hasil analisis data disajikan dan dibahas. Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan metode analisis yang telah disiapkan sebelumnya.

BAB V : PENUTUP

Bagian ini berisi ringkasan dari hasil pengujian dan diskusi komprehensif mengenai penelitian yang telah dijalankan, saran untuk penelitian mendatang, dan dampak dari hasil penelitian tersebut.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi dan Korupsi

Teori Agensi menurut Jensen dan Meckling (1976) menggambarkan kesinambungan hubungan antar agen sebagai pihak yang berkepentingan (masyarakat) dan prinsipal sebagai pihak yang bertindak (pemerintah). Hubungan antar agen dan prinsipal dapat menimbulkan konflik karena adanya perilaku opportunistik dari agen yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi dan sering kali dengan mengesampingkan kepentingan masyarakat dalam setiap keputusan yang mereka ambil (Maria *et al*., 2017).

Pengertian teori agensi dapat dikaitkan dengan fenomena kecurangan tindak korupsi dari pemegang kekuasaan yang salah satu faktornya didorong atas motif ekonomi ataupun faktor untuk mempertahankan kekuasaan politik (Gorsira *et al*., 2018). Setyobudi dan Setyaningrum (2019) menyatakan bahwa negara berkembang memiliki kemungkinan terjadinya korupsi lebih tinggi daripada negara berkembang, dan hal ini juga memiliki implikasi yang signifikan di wilayah ASEAN sebagai wilayah dengan 9 dari 10 negara berkembang. Praktek korupsi biasanya dilakukan oleh prinsipal (pejabat) yang memiliki jabatan tinggi dengan sistem pengawasan yang dapat ia kendalikan dan penegakan hukum yang cenderung lemah (Maria *et al*., 2017). Demikian, dampak korupsi dapat mempengaruhi belanja pemerintah, alokasi sumber daya, dan menurunkan tingkat

kepercayaan investor untuk menginvestasikan hartanya di negara yang korup (Cataldo dan Mastrorocco, 2022).

2.1.2 Indeks Persepsi Korupsi

Tingkat korupsi suatu negara dapat diukur dengan Indeks Persepsi Korupsi yang diperkenalkan oleh *Transparency International* pada tahun 1995 melalui survei yang dilakukan tiap tahun berdasarkan persepsi masyarakat dan pengamat ahli tentang kinerja pemerintah yang berkaitan dengan layanan bebas korupsi dalam pemerintahan dan sektor publik. Survei tersebut mengikutkan 180 negara di dunia dengan urutan skala 0-100 yang berarti 0 merupakan negara dengan korupsi tinggi dan nilai 100 yang diinterpretasikan sebagai negara dengan tindak korupsi yang rendah (*Transparency International*, 2023).

2.1.3 *E-Government*

E-Government merupakan penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh pemerintah dalam penyelenggaraan layanan publik, interaksi dengan masyarakat, dan fungsi-fungsi pemerintahan (United Nation, 2020). Menurut United Nation (2020) konsep *E-Government* saat ini didefinisikan secara luas sebagai penggunaan dan penerapan beragam TIK untuk mengelola organisasi pemerintah, meningkatkan sistem pemberian layanan publik, dan memperluas interaksi antara pemerintah dengan masyarakat secara efektif.

E-Government dapat dinilai dengan *E-Government Development Index* yang merupakan indeks rata-rata yang terdiri dari tiga komponen utama: (1) indeks layanan *online* atau *Online Services Index* (OSI); (2) indeks infrastruktur

telekomunikasi atau *Telecommunications Infrastructure Index* (TII); dan (3) indeks kapasitas sumber daya manusia atau *Human Capital Index* (HCI).

a OSI menilai sejauh mana aksesibilitas isi situs pemerintahan di setiap negara sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh PBB, yang mencakup informasi yang diperlukan dalam situs tersebut. OSI juga berusaha memperhitungkan tingkat kematangan layanan TIK suatu negara, yang diklasifikasikan dalam empat fase: fase informasi, fase interaksi, fase transaksi, dan fase transformasi.

b TII diukur berdasarkan lima indikator: (1) jumlah komputer (PC); (2) jumlah pengguna internet; (3) jaringan telepon; (4) pengguna layanan telepon seluler; dan (5) jumlah pelanggan internet *broadband*, masing-masing diukur per 100 penduduk.

c HCI terdiri dari tingkat kemampuan baca (*literacy rate*) dan tingkat partisipasi dalam pendidikan (*gross enrollment ratio*) untuk pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.

E-Government mulai berkembang di ASEAN dipelopori oleh Brunei Darussalam saat memperkenalkan visi Wawasan Brunei 2035 pada tahun 1970-an untuk mendukung pertumbuhan negara dan diikuti oleh negara Singapura dengan proyek *Intelligent Nation,* lalu diikuti oleh Malaysia di tahun 1997 serta Indonesia mulai menerapkan *E-Government* pada tahun 2001 (Maria *et al*., 2017). Perkembangan *E-Government* di Indonesia diperkelakan dengan adanya instruksi presiden No.6/2001 mengenai Telematika yang menyatakan bahwa aparat

pemerintah harus menggunakan teknologi untuk mendukung tata kelola yang baik dan mempercepat demokrasi (Yulianingsih *et al*., 2022).

2.1.4 Indeks Kebebasan Pers

Dalam Indeks Kebebasan Pers atau *Press Freedom Index* (PFI) Setiap skor negara atau wilayah dievaluasi menggunakan lima indikator kontekstual yang mencerminkan situasi kebebasan pers dalam semua kompleksitasnya: konteks politik, kerangka hukum, konteks ekonomi, konteks sosial budaya, dan keselamatan (*Reporters Without Borders*, 2024). Skor berkisar dari 0 hingga 100 dihitung untuk setiap indikator. Semua skor tambahan berkontribusi secara setara terhadap skor global. dalam setiap indikator, semua pertanyaan dan subpertanyaan memiliki bobot yang sama.

2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia atau *Human Development Index* (HDI) terdiri dari empat indikator utama, yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan kemampuan daya beli (Kurniawan *et al*., 2020). Angka harapan hidup menunjukkan dimensi umur panjang dan sehat. Angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mencerminkan hasil dari dimensi pengetahuan. Sedangkan, indikator kemampuan daya beli mengukur dimensi kehidupan yang layak. IPM dinyatakan dalam skala dari 0 (tingkat pembangunan manusia paling rendah) hingga 100 (tingkat pembangunan manusia tertinggi). Penting untuk dicatat bahwa IPM mengukur tingkat pembangunan manusia secara relatif, bukan absolut.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terangkum dalam tabel berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti dan Tahun	Judul	Variabel	Hasil
1	Silal *et al*. (2023)	Examining the role of *E-Government* in controlling corruption: A longitudinal study	Variabel Dependen: Control of Corruption Variabel Independen: EGOV, HCI, TII, and OSI	Ditemukan bahwa infrastruktur telekomunikasi dan sumber daya manusia berpengaruh tidak signifikan terhadap indeks persepsi korupsi, sedangkan layanan *online* berpengaruh negatif signifikan terhadap indeks persepsi korupsi.
2	Kalesnikaite *et al*. (2023)	Parsing the impact of *E-Government* onbureaucratic corruption	Variabel Dependen: Control of Corruption Variabel Independen: EGOV, HCI, TII, and OSI	Ditemukan bahwa infrastruktur telekomunikasi dan indeks pelayanan *online* berpengaruh signifikan terhadap indeks persepsi korupsi, serta sumberdaya manusia berpengaruh tidak signifikan terhadap indeks persepsi korupsi.
3	Kurniawan *et al*. (2023)	The Influence of Macroeconomic Factors and Corruption on Human Development in ASEAN-7	Variabel Dependen: HDI Variabel Independen: GDP, CPI	Ditemukan bahwa CPI berpengaruh negatif terhadap HDI
4	Rahman *et al*. (2020)	Perbandingan *E-Government* Antara Singapura Dan Jepang:Perspektif Determinan Dan Perannya Dalam Mengefektifkan Pemerintahan Dan Mengendalikan Korupsi	Variabel Dependen: Implementasi *E-Government* di Singapura dan Jepang Variabel Independen: Efektivitas pemerintahan dan tingkat korupsi:	Ditemukan bahwa infrastruktur telekomunikasi, indeks pelayanan *online,* dan sumber daya manusia berpengaruh negatif signifikan terhadap indeks persepsi korupsi.
5	Flavin dan Montgomery (2020)	Freedom of the press and perceptions about government corruption	Variabel Dependen: Perception of Corruption Index Variabel Independen: Press Freedom	Ditemukan bahwa ada hubungan negatif antara kebebasan pers terhadap persepsi korupsi

Tabel 2. 2 Lanjutan

6	Setyobudi dan Setyaningrum (2019)	*E-Government* and corruption perception index: a cross-country study	Variabel Dependen: corruption perception index Variabel Independen: *E-Government* implementation	Ditemukan bahwa pembangunan infrastruktur berpengaruh negatif signifikan, indeks pelayanan *online* berpengaruh negatif tidak signifikan dan sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap indeks persepsi korupsi.
7	Alves *et al*. (2017)	Analysis of Correlation among HDI (*Human Development Index*), Violence and Corruption Perceptions Index	Variabel Dependen: Correlation Variabel Independen: CPI, HDI and Violence	Ditemukan bahwa adanya hubungan positf atas CPI terhadap HDI.
8	Martins *et al*. (2018)	The War on Corruption: The Role of Electronic Government	Variabel Dependen: Control of Corruption Index Variabel Independen: E-Goverment	Ditemukan bahwa indeks pelayanan *online* berpengaruh negatif terhadap indeks persepsi korupsi dan infrastruktur telekomunikasi serta sumberdaya manusia berpengaruh negatif signifikan terhadap indeks persepsi korupsi.
9	Yuliyana dan Setyaningrum (2016)	Pengaruh Penerapan *E-Government* dan Akuntabilitas terhadap Persepsi Korupsi di Kementerian/Lembaga	Variabel Dependen: Persepsi Korupsi Variabel Independen: Penerapan *E-Government*, dan akuntabilitas	Ditemukan bahwa infrastruktur telekomunikasi, indeks pelayanan *online* dan sumber daya manusia berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi korupsi.
10	Starke *et al*. (2016)	Free to Expose Corruption: The Impact of Media Freedom, Internet Access, and Governmental *Online* Service Delivery on Corruption	Variabel Dependen: Control of Corruption Index Variabel Independen: Media Freedom, Internet Access, and Governmental *Online* Service Delivery	Ditemukan bahwa ada hubungan negatif antara kebebasan pers terhadap persepsi korupsi

2.3 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan kerangka pikir yang telah dijabarkan di atas, maka penelitian ini memiliki hipotesis sebagai berikut:

2.3.1 Pengaruh peningkatan Indeks Infrastruktur Telekomunikasi terhadap Indeks Persepsi Korupsi

Indeks Infrastruktur Telekomunikasi (TII) menggambarkan seberapa mampu suatu negara menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memastikan kesamarataan akses perangkat elektronik termasuk koneksi internet (Silal et al., 2023). Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat mengurangi korupsi karena TIK meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam administrasi pemerintahan. Dengan penerapan sistem *E-Government,* informasi publik menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat, yang memungkinkan adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap tindakan pemerintah.

Penelitian oleh Gabriel dan Wellington (2022) juga mendukung bahwa otomatisasi proses administrasi mengurangi kebutuhan interaksi tatap muka antara pejabat dan masyarakat, yang sering kali menjadi peluang untuk praktik. Infrastruktur telekomunikasi yang kuat mendukung teori agensi dengan cara meningkatkan transparansi, memfasilitasi pengawasan publik, dan menyediakan data yang dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan. Semua ini berkontribusi pada pengurangan persepsi dan praktik korupsi, karena agen (pejabat publik) lebih mungkin untuk bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal (masyarakat) ketika mereka diawasi secara transparan dan ada

mekanisme akuntabilitas yang efektif. Dengan demikian, investasi dalam infrastruktur telekomunikasi bukan hanya memajukan teknologi dan ekonomi, tetapi juga memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif. TIK juga memfasilitasi pencatatan dan pelacakan transaksi secara elektronik, sehingga mengurangi kemungkinan manipulasi data dan penyelewengan dana.

Peran dari adanya pengembangan TIK memungkinkan pelaporan dan pengaduan korupsi secara anonim melalui platform *online,* sehingga meningkatkan partisipasi publik dalam pencegahan korupsi. Dengan demikian, investasi dalam pengembangan TIK merupakan langkah strategis dalam upaya memerangi korupsi dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan (Setyobudi dan Setyaningrum, 2019). Sebagaimana didukung oleh Silal *et al.* (2023) jika tingkat infrastruktur telekomunikasi di tiap negara semakin meningkat, akses masyarakat terhadap informasi berkualitas meningkat secara signifikan, maka berdampak pada penurunan asimetri informasi, peningkatan transparansi, dan penurunan tingkat korupsi. Beberapa penelitian terlebih dahulu mengenai dampak infrastruktur telekomunikasi terhadap persepsi korupsi seperu yang telah dilakukan oleh Kalesnikaite *et al*. (2023) dan Setyobudi dan Setyaningrum (2019). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Infrastruktur telekomunikasi memiliki pengaruh yang negatif terhadap persepsi korupsi. Sehingga didapatkan rumusan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Indeks Infrastruktur Telekomunikasi (*Telecommunication Infrastructure Indeks* - TII) berpengaruh negatif terhadap Indeks Persepsi Korupsi (CPI).

2.3.2 Pengaruh peningkatan Indeks Layanan Online terhadap Indeks Persepsi Korupsi

Dengan adanya layanan *online*, maka dapat digambarkan adanya digitalisasi penyampaian layanan publik dari suatu negara yang mewakili kemampuan penggunaan TIK yang mumpuni (Nam, 2018). Layanan *online* yang diterapkan oleh pemerintah setempat bertujuan untuk mempermudah proses penyampaian layanan publik karena mekanisme *online* membantu masyarakat melacak proses pemberian layanan secara *end-to-end*, sehingga menjamin transparansi dan mengurangi ketidakpastian (Venkatesh *et al*., 2016).

Semakin tinggi tingkat keterlibatan agen, semakin tinggi juga tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam layanan publiknya. Tingkat keterlibatan ini dapat memperluas kekuasaan mereka untuk bertindak sehingga memberikan celah untuk adanya suap dan praktik korupsi (Prasad dan Shivarajan, 2015). Dengan ini, sejalan dengan teori agensi dalam konteks menurunkan persepsi korupsi melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi sehingga pemerintah harus melakukan restrukturisasi layanan dengan mengurangi interaksi manusia yaitu dengan melakukan digitalisasi layanan publik. Demikian, layanan *online* yang lebih canggih dapat mewujudkan sistem pelayanan publik yang transparan, disintermediasi, dan akuntabel yang mana dapat menekan kebocoran informasi dan menghilangkan peluang untuk terjadinya suap dan bantuan lainnya (Nam, 2018). Penelitian terdahulu mengenai hubungan antara Layanan *online* dengan persepsi korupsi seperti yang telah dilakukan oleh Kalesnikaite *et al*. (2023) dan Setyobudi dan Setyaningrum (2019) menyatakan

bahwa layanan *online* berpengaruh negatif terhadap tingkat persepsi korupsi. Dari pembahasan tersebut didapatkan rumusan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Indeks Layanan *Online* (*Online* Service Indeks - OSI) berpengaruh negatif terhadap tingkat Indeks Persepsi Korupsi (CPI).

2.3.3 Pengaruh peningkatan Indeks Sumberdaya Manusia terhadap Indeks Persepsi Korupsi

Sumber Daya Manusia (*human capital*) memiliki peran penting dalam menurunkan tingkat korupsi terutama di negara-negara berkembang. Peningkatan tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat serta pegawai pemerintahan dapat memperkuat kesadaran akan dampak negatif korupsi dan meningkatkan kemampuan untuk menolak atau melawan tindakan korupsi. Sugiharti *et al*. (2023) dalam studinya menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah.

Pendidikan yang baik membentuk nilai-nilai etis dan integritas yang tinggi serta menciptakan tenaga kerja yang lebih profesional dan kompeten dalam menjalankan tugas-tugasnya tanpa terpengaruh oleh godaan korupsi. Hal ini penting di kawasan ASEAN, di mana peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dapat berkontribusi pada pembangunan institusi yang lebih transparan dan akuntabel. Pegawai pemerintahan yang berpendidikan tinggi dan terlatih baik lebih mampu mengadopsi dan mengelola sistem pelaporan dan pengawasan berbasis teknologi, yang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas ini

sejalan dengan teori agensi dimana pendidikan yang baik meningkatkan kesadaran tentang pentingnya akuntabilitas dan transparansi pemerintahan seperti didukung dalam penelitian oleh Boufounou *et al*. (2024) yang menemukan bahwa peningkatan kapasitas administrasi publik melalui pelatihan dan pendidikan dapat mengurangi korupsi dengan cara memperkuat kontrol internal dan mekanisme audit. Di ASEAN, di mana negara-negara sedang berusaha untuk meningkatkan *E-Government* dan layanan *online*, Sumber Daya Manusia yang unggul menjadi kunci untuk memastikan bahwa teknologi digunakan secara optimal untuk memerangi korupsi. Beberapa penelitian terlebih dahulu oleh Silal *et al*. (2023) Dari pembahasan tersebut didapatkan hipotesis berupa :

H3 : Indeks Sumber Daya Manusia (*Human Capital Index* - HCI) berpengaruh negatif terhadap tingkat Indeks Persepsi Korupsi (CPI)

2.3.4 Pengaruh peningkatan Indeks Kebebsasan Pers terhadap Indeks Persepsi Korupsi

Kebebasan pers dapat mengurangi korupsi karena pers yang bebas dan independen dapat melakukan investigasi yang lebih efektif dan memberikan informasi yang akurat dan berimbang (Lidya *et al*., 2019). Dengan demikian, masyarakat dapat lebih terinformasi dan lebih mudah untuk mengetahui tentang korupsi yang terjadi, sehingga mereka dapat lebih aktif dalam menentang dan menghentikan praktik korupsi. Selain itu, pers yang bebas juga dapat memantau dan mengevaluasi tindakan pemerintah dan lembaga lain yang terkait dengan korupsi, sehingga dapat memastikan bahwa pemerintah dan lembaga tersebut bertindak sesuai dengan hukum dan etika (Flavin dan Montgomery, 2020).

Hubungan antara kebebasan pers dan korupsi juga dapat dipahami melalui teori agensi. Teori ini menjelaskan bahwa pers memiliki peran sebagai "*watchdog*" yang memantau dan mengevaluasi tindakan pemerintah dan lembaga lain, serta memberikan informasi sebagai transparasi yang akurat dan berimbang kepada masyarakat. Dengan demikian, pers dapat memastikan bahwa pemerintah dan lembaga tersebut bertindak sesuai dengan hukum dan etika, sehingga korupsi dapat dihentikan. Studi yang dilakukan oleh Starke *et al*. (2016) menunjukkan bahwa kebebasan pers memiliki korelasi negatif dengan persepsi korupsi, karena pers yang bebas dapat melakukan investigasi yang lebih efektif dan memberikan informasi yang akurat dan berimbang. Maka dari itu, didapatkan hipotesis berupa:

H4 : Indeks Kebebasan Pers (*Press Freedom Index* - PFI) berpengaruh negatif terhadap tingkat Indeks Persepsi Korupsi (CPI)

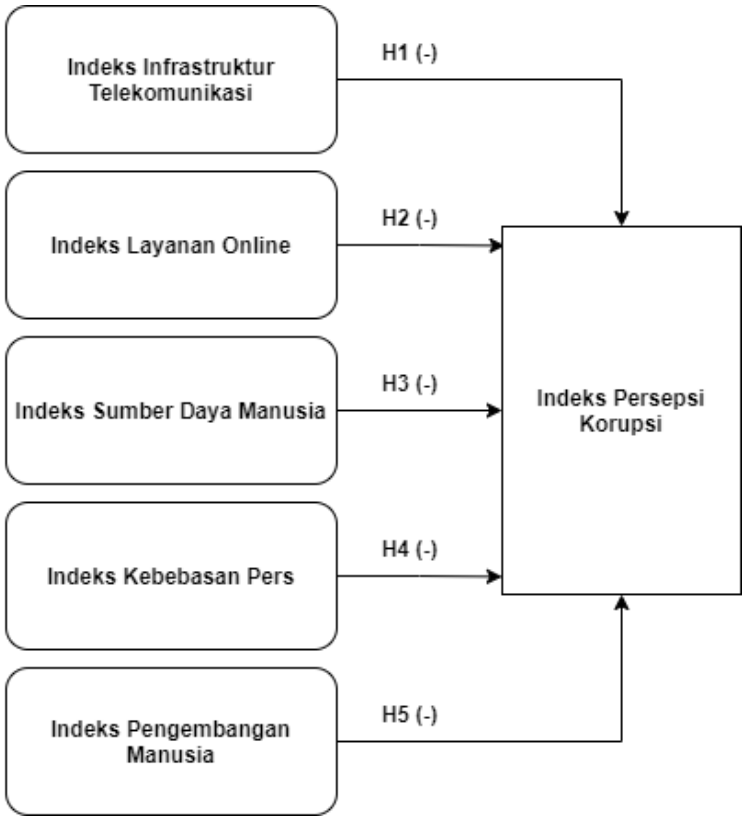
2.3.5 Pengaruh peningkatan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Indeks Persepsi Korupsi

Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah salah satu indikator yang digunakan oleh PBB untuk mengukur kemajuan suatu negara dalam hal kesejahteraan manusia. IPM menggabungkan beberapa dimensi penting, seperti harapan hidup yang panjang, pendidikan yang lebih baik, dan standar hidup yang layak. Dimensi IPM seperti pendidikan yang lebih baik, harapan hidup yang panjang, dan standar hidup yang layak mencerminkan kapasitas individu dalam memahami dan berpartisipasi dalam urusan publik, termasuk pengawasan terhadap tindakan korupsi. Boufounou *et al*. (2024) menyoroti pentingnya akses informasi, pendidikan, dan partisipasi politik dalam

memberdayakan masyarakat untuk menuntut akuntabilitas dan transparasi dari para pemimpin dan institusi publik yang sejalan dengan teori agensi. Penelitian terdahulu oleh Kurniawan *et al*. (2023) dan Sarabia *et al*. (2020) menyatakan bahwa *Human Development Index* berpengaruh negatif terhadap persepsi korupsi suatu negara. Maka, dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H5 : Pembangunan Manusia berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat persepsi korupsi (CPI).

2.4 Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 menunjukkan hubungan variabel-variabel yang akan diuji dalam penelitian ini yang mana memiliki satu variabel dependen yaitu Indeks

Persepsi Korupsi (CPI) dan lima variabel independen yang menghasilkan hipotesis pertama yaitu Indeks Infrastruktur Telekomunikasi (TII) berpengaruh negatif terhadap Indeks Persepsi Korupsi (CPI), hipotesis kedua yaitu Indeks Layanan *Online* (OSI) berpengaruh negatif terhadap Indeks Persepsi Korupsi (CPI), hipotesis tiga yaitu Indeks Sumber Daya Manusia (HCI) berpengaruh negatif terhadap Indeks Persepsi Korupsi (CPI), hipotesis empat berupa Indeks Kebebasan Pers berpengaruh negatif terhadap Indeks Persepsi Korupsi (CPI)) dan yang terakhir hipotesis lima adalah Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif terhadap tingkat persepsi korupsi (CPI).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dari jenis data dan metode analisis data yang digunakan, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Metode ini dapat digambarkan sebagai metode ilmiah yang bersifat *scientific* karena melihat populasi atau sampel tertentu, menggunakan instrumen penelitian, dan menganalisis data sesuai dengan prinsip ilmiah yang konkret, empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2013).

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data panel yang merupakan kombinasi data *cross-sectional* dan data *time series* dari 10 negara di ASEAN yang disurvei oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (*United Nations*) dan *Transparency International* dalam 20 tahun kebelakang yaitu dari tahun 2004-2022 namun hanya diambil data sebanyak 10 tahun dikarenakan data survei oleh *United Nations* dilakukan setiap 2 tahun sekali. Dari *Transparency Internasional* didapat data *Corruption Preception Index* (CPI) yang dapat menggambarkan kondisi seberapa korup suatu negara dan dari *website* resmi *United Nations* didapat data *E-Government Development Indeks* (EGDI) yang menggambarkan seberapa berkembang suatu negara dari persepsi warganya. Nilai perkembangan negara dalam penelitian ini menggunakan EGDI yang terdiri atas *Telecommunication infrastructure index, Online Service Index, dan Human Capital Indeks*. Adapula data *Press Freedom Index* yang didapat dari *World Bank*

Group dan *Human Development Index* yang didapat dari situs *United Nations Development Programme.*

3.3 Definisi dan Pengukuran variabel

3.3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen pada penelitian ini adalah tingkat Corruption Preception Indeks dari 10 negara ASEAN. CPI adalah pengukur kontrol korupsi yang cukup terkenal dan sudah banyak digunakan dalam berbagai penelitian seperti yang pernah dilakukan oleh Zhao *et al*. (2021). CPI menangkap persepsi pengusaha maupun ahli mengenai tingkat korupsi di lembaga-lembaga nasional yang mencakup antara lain lembaga peradilan, legislatif, polisi, dan lembaga penegak hukum lainnya, militer, layanan publik, dan media. Nilai CPI yang diperoleh melalui penilaian ahli dan survei opini, berkisar antara 0 hingga 100, dengan nilai yang lebih tinggi berarti korupsi yang lebih rendah, yaitu Pengendalian Korupsi yang lebih tinggi.

3.3.2 Variabel Independen

3.3.2.1 Infrastruktur Telekomunikasi

Indeks Infrastruktur Telekomunikasi dioperasionalkan menggunakan *Telecommunication infrastructure index* yang dinilai menggunakan lima indikator yaitu: jumlah komputer (PC), jumlah pengguna internet, jaringan telepon, pengguna layanan telepon mobile dan jumlah pelanggan internet *broadband* . TII berskala 0-1 di mana nilai yang lebih tinggi mewakili TI yang lebih baik di negara tersebut.

3.3.2.2 Indeks Layanan *Online*

Indeks Layanan *Online* dioperasionalkan menggunakan OSI, yang menilai penerapan alat TIK oleh pemerintah untuk memberikan layanan publik. PBB menilai layanan *online* tiap negara dengan cara (i) mengidentifikasi dan menemukan situs web nasional dan kementerian yang relevan, berdasarkan informasi yang diberikan oleh masing-masing negara anggota dan/atau melalui mesin pencari dan (ii) mengevaluasi secara cermat masing-masing situs web tersebut berdasarkan Pedoman Aksesibilitas Konten Web di *World Wide Web* Konsorsium. Selain memastikan objektivitas dan keakuratan pengukuran yang diperoleh, Tim penjamin dari PBB melakukan penyesuaian akhir dalam skor OSI bersekala 0-1 dengan nilai terbesar merepresentasikan *Online Service* yang bagus.

3.3.2.3 Indeks Sumber Daya Manusia

Indeks Sumber Daya Manusia dioperasionalkan menggunakan *Human Capital Index* (HCI) yang merupakan ukuran tingkat negara yang terdiri dari presentase melek huruf orang dewasa, rasio partisipasi, durasi pendidikan yang diharapkan dan rata-rata durasi pendidikan. HCI berskala 0-1 di mana nilai yang lebih tinggi mewakili *Human Capital* yang lebih baik di negara tersebut.

3.3.2.4 Indeks Kebebasan Pers

Indeks Kebebasan Pers dioperasionalkan menggunakan *Press Freedom Index* dimana setiap skor negara atau wilayah dievaluasi menggunakan lima indikator kontekstual yang mencerminkan situasi kebebasan pers dalam semua kompleksitasnya: konteks politik, kerangka hukum, konteks ekonomi, konteks

sosial budaya, dan keselamatan (*Reporters Without Borders*, 2024). Skor berkisar dari 0 hingga 100 dihitung untuk setiap indikator di mana nilai yang lebih tinggi mewakili kebasan pers yang lebih baik.

3.3.2.5 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia dioperasionalkan menggunakan *Human Development Index* yang merupakan indikator yang digunakan oleh PBB untuk mengukur kemajuan suatu negara dalam hal kesejahteraan manusia. IPM menggabungkan beberapa dimensi penting, seperti harapan hidup yang panjang, pendidikan yang lebih baik, dan standar hidup yang layak. HDI berskala 0-1 di mana nilai yang lebih tinggi mewakili pengembangan manusia yang lebih baik di negara tersebut.

3.4 Analisis Data

3.4.1 Model Regresi Data Panel

3.4.1.1 *Common Effect Model* (CEM)

Model *Common Effect* merupakan model yang mengkombinasikan data *cross section* dan *time series* sebagai satu kesatuan tanpa melihat adanya perbedaan waktu dan entitas (individu, perusahaan, dll). Model *Common Effect* menggunakan pengestimasian *Ordinary Least Square* (OLS) atau metode kuadrat terkecil (Napitupulu *et al*., 2021).

3.4.1.2 *Fixed Effect Model* (FEM)

Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan intersepnya. Untuk mengestimasi data panel model

fixed effects menggunakan teknik *variable dummy* untuk menangkap perbedaan intersep antar perusahaan, perbedaan intersep bisa terjadi karena perbedaan budaya kerja, manajerial, dan insentif. Tetapi demikian kecenderungannya sama antar perusahaan. Model estimasi ini disebut juga dengan teknik *Least Squares Dummy Variable* (LSDV). Pendekatan ini mengasumsikan bahwa intersep dari setiap individu adalah berbeda sedangkan slope antar individu adalah tetap (Nani, 2022)

3.4.1.3 *Random Effect Model* (REM)

Model ini melakukan estimasi untuk data panel di mana variabel gangguan mungkin saling berkaitan dari waktu ke waktu dan antar individu. Dalam model Efek Acak, perbedaan antar intersep diakomodasi oleh istilah kesalahan yang berbeda untuk setiap perusahaan. Kelebihan menggunakan model ini adalah mengatasi masalah heteroskedastisitas. Model ini juga dikenal sebagai *Error Component Model* (ECM) atau menggunakan teknik *Generalized Least Square* (GLS) (Napitupulu *et al*., 2021).

3.4.2 Uji Estimasi Model

3.4.2.1 Uji Chow

Ketika peneliti ingin mengestimasi model regresi data panel, Uji Chow adalah metode uji yang digunakan untuk memilih model yang sesuai antara model *common effect* dan *fixed effect*. Pengujian ini menggunakan hipotesis berikut:

H0: Common Effect Model, P-statistic F > 0.05

Ha: Fixed Effect Model, P-statistic F < 0.05

3.4.2.2 Uji Hausman

Uji Hausman adalah uji lanjutan dari uji Chow untuk memilih model yang sesuai antara FEM dan CEM. Hipotesis yang digunakan adalah:

H0: *Random Effect Model*, P-statistic > 0.05

Ha: *Fixed Effect Model*, P-statistic F < 0.05

3.4.2.3 Uji Lagrage-Multiplier (LM)

Untuk mengevaluasi apakah model efek acak lebih baik daripada model Efek Umum, digunakan uji Lagrange-Multiplier (LM). Uji signifikansi *Random Effect* ini dikembangkan oleh Breusch-Pagan dan didasarkan pada residual dari metode *Common Effect.*

H0: *Common Effect Model*, P-statistic F > 0.05

Ha: *Random* Effect Model, P-statistic > 0.05

Jika, hasil pemilihan model yang terbaik menggunakan model *random effect,* maka tidak perlu melakukan Uji Asumsi Klasik. Hal ini mengacu pada Chandra *et al*. (2019) yang menyatakan bahwa metode estimasi data panel model pengaruh acak (*random effect model*) adalah model yang menggunakan metode *generalized least square* (GLS). Sedangkan metode estimasi data panel model pengaruh gabungan (*common effect*) dan model panel pengaruh tetap *(fixed effect*) adalah model yang menggunakan *ordinary least square* (OLS).

3.4.3 Uji Asumsi Klasik

3.4.3.1 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui apabila ada korelasi antar tiap variabel bebasyang sangat kuat. Apabila ada kolinear sempurna, maka akan diragukan keakuratannya (Napitupulu *et al*., 2021).

Jika ada korelasi < 0.9 antar variabel bebas maka H0 diterima dan sebaliknya, jika nilai korelasi tiap variabel bebas > 0.9 maka terdapat masalah multikolinearitas.

3.4.3.2 Uji Heteroskedasitas

Uji Heteroskedasitas adalah uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear (Juliandi *et al*., 2014). Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan model pengujian Glejser. Kriteria yang digunakan adalah jika nilai signifikansi ≥ 0,05, maka tidak ada masalah heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai signifikansi < 0,05, maka terdapat masalah heteroskedastisitas.

Jika terdapat masalah heteroskedastisitas, diperlukan langkah-langkah lanjutan untuk mengatasinya. Salah satu metode adalah dengan menggunakan grafik, dimana jika grafik residual melewati batasan -500 dan 500, maka gejala heteroskedastisitas masih ada. Sebaliknya, jika grafik residual tidak melewati batas -500 dan 500, maka residual lolos uji heteroskedastisitas. Cara lain yang bisa digunakan termasuk transformasi data dengan logaritma natural (ln), atau metode lainnya (Napitupulu *et al*., 2021).

3.4.4 Uji Hipotesis

3.4.4.1 Uji T

Uji t dalam Ghozali (2013) bertujuan untuk menguji apakah terdapat hubungan antara masing-masing variabel bebas dalam penelitian ini, yaitu Implementasi *E-Government*, perkembangan Infrastruktur Telekomunikasi, Layanan *Online*, Sumber Daya Manusia, dan Pembangunan Manusia terhadap variabel terikat, yaitu Persepsi Korupsi di ASEAN. Pengambilan keputusan dalam uji t adalah sebagai berikut:

a. *P value* < α = 0,05 berarti variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara individual.
b. *P value* > α = 0,05 berarti variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara individual.

3.4.4.2 Uji F

Uji F atau uji model digunakan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan layak atau tidak (Purwanto, 2019).

a. Jika nilai probabilitas < 0,05 maka model persamaan regresi layak digunakan.
b. Jika nilai probabilitas > 0,05 maka model persamaan regresi tidak layak digunakan.

3.4.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R2)

Uji koefisien determinasi (R2) dilakukan untuk mengukur dan memprediksi seberapa besar kontribusi variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen (Purwanto, 2019). Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 dan 1. Jika nilainya mendekati 1, ini menunjukkan bahwa variabel independen memberikan sebagian besar informasi yang diperlukan untuk memprediksi variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai R2 semakin kecil, ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen terbatas.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data panel yang menggabungkan data *time series* dari periode 2004-2022 dan *cross-section* dari 10 negara asia tenggara yaitu Indonesia, Malaysia, Kambodia, Filipina, Vietnam, Laos, Brunei Darussalam, Myanmar, Singapura, Vietnam dan Thailand. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami pengaruh variabel independen yang terdiri dari Indeks Infrastruktur Telekomunikasi (X1), Indeks Layanan *Online* (X2), Indeks Sumber Daya Manusia (X3), Indeks Kebebasan Pers (X4) dan Indeks Pembangunan Manusia (X5) terhadap variabel dependen berupa Indeks Persepsi Korupsi di negara Asia Tenggara periode 2004-2022.

Dari data 19 tahun tersebut, diambil data sebanyak 10 tahun dikarenakan data survei Indeks Infrastruktur Telekomunikasi, Indeks Layanan *Online*, dan Indeks Sumber Daya Manusia oleh *United Nations* dilakukan setiap 2 tahun sekali. Data sekunder diperoleh dari website resmi *Transparency International*, *United Nations, World Bank,* dan *United Nations Development Programme*. Kemudian data diolah menggunakan Eviews 12 *Student Version* dengan metode regresi data panel *unbalanced*.

4.2 Statistik Deskriptif Variabel

Tabel 4. 1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Keterangan	TII	OSI	HCI	PFI	HDI	CPI
Mean	0.34522	0.49223	0.73320	0.50947	0.69776	0.38688
Median	0.30235	0.50501	0.74800	0.52590	0.69600	0.34000
Maximum	0.88990	1.00000	0.92033	1.00000	0.94900	0.94000
Minimum	0.00000	0.02362	0.47847	0.14000	0.44500	0.13000
Std. Dev.	0.26104	0.27084	0.12321	0.17167	0.12195	0.20324
Observation	93	93	93	93	93	93

Sumber: data olahan Eviews 12 SV, 2024

Legend: TII: indeks infrastruktur telekomunikasi; OSI: indeks layanan *online*; HCI: Indeks sumber daya manusia; PFI: indeks kebebasan pers; HDI: indeks pembangunan manusia

Tabel 4.1 menjelaskan hasil analisis statistik deskriptif pada variabel Indeks Infrastruktur Telekomunikasi (TII) memiliki nilai minimum yang diperoleh sebesar 0 tahun 2012 dari negara Myanmar. Sedangkan nilai maksimum 0.88990 diperoleh dari negara Singapura pada tahun 2020, nilai rata-rata indeks infrastruktur telekomunikasi (TII) periode 2002-2022 dari 93 observasi adalah sebesar 0.34533 dan standar deviasi data indeks infrastruktur telekomunikasi (TII) adalah 0.26104.

Hasil analisis statistik deskriptif pada variabel Indeks Layanan Online (OSI) memiliki nilai minimum yang diperoleh sebesar 0.02362 dari negara Myanmar pada tahun 2014. Sedangkan nilai maksimum 1.00000 diperoleh dari negara Singapura pada tahun 2012, nilai rata-rata Indeks Layanan Online (OSI) periode 2002-2022 dari 93 observasi adalah sebesar 0.49223 dan standar deviasi data Indeks Layanan Online (OSI)) adalah 0.27084.

Hasil analisis statistik deskriptif pada variabel Indeks Sumberdaya Manusia (HCI) memiliki nilai minimum yang diperoleh sebesar 0.47847 dari

negara Kamboja pada tahun 2016. Sedangkan nilai maksimum 0.92033 diperoleh dari negara Singapura dan Thailand pada tahun 2010, nilai rata-rata Indeks Sumberdaya Manusia (HCI) periode 2002-2022 dari 93 observasi adalah sebesar 0.73320 dan standar deviasi data Indeks Sumberdaya Manusia (HCI) adalah 0.12321.

Hasil analisis statistik deskriptif pada variabel Indeks Kebebasan Pers (PFI) memiliki nilai minimum yang diperoleh sebesar 0.14000 dari negara Myanmar pada tahun 2004. Sedangkan nilai maksimum 1.00000 diperoleh dari negara Thailand pada tahun 2004, nilai rata-rata Indeks Kebebasan Pers (PFI) periode 2002-2022 dari 93 observasi adalah sebesar 0.50947 dan standar deviasi data Indeks Kebebasan Pers (PFI) adalah 0.17167.

Hasil analisis statistik deskriptif pada variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki nilai minimum yang diperoleh sebesar 0.44500 dari negara Myanmar pada tahun 2004. Sedangkan nilai maksimum 0.94900 diperoleh dari negara Singapura pada tahun 2022, nilai rata-rata variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) periode 2002-2022 dari 93 observasi adalah sebesar 0.69776 dan standar deviasi data variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah 0.12195.

Hasil analisis statistik deskriptif pada variabel Indeks Persepsi Korupsi (CPI) memiliki nilai minimum yang diperoleh sebesar 0.13000 dari negara Myanmar pada tahun 2008. Sedangkan nilai maksimum 0.94000 diperoleh dari negara Singapura pada tahun 2005, nilai rata-rata variabel Indeks Persepsi

Korupsi (CPI) periode 2002-2022 dari 93 observasi adalah sebesar 0.386882 dan standar deviasi data variabel Indeks Persepsi Korupsi (CPI) adalah 0.20324.

4.3 Model Regresi Data Panel

4.3.1 *Common Effect Model* (CEM)

Tabel 4. 2 Hasil CEM

Variable	Coefficient	Std.Error	t-statistic	Prob
TII	0.056472	0.079073	0.714168	0.47700
OSI	-0.102637	0.082495	-1.244165	0.21680
HCI	-0.000171	0.121092	-0.001409	0.99890
PFI	0.079921	0.059608	1.340781	0.18350
HDI	1.606804	0.188402	8.528603	0.00000
R-squared	0.802880			
Adjusted R-squared	0.791552			

Sumber: data olahan Eviews 12 SV, 2024

Legend: TII: indeks infrastruktur telekomunikasi; OSI: indeks layanan *online*; HCI: Indeks sumber daya manusia; PFI: indeks kebebasan pers; HDI: indeks pembangunan manusia

Hasil Regresi data panel dengan *Common Effect Model* (CEM) pada Tabel 4.1 menunjukkan nilai *R-squared* sebesar 0.802880 atau sebesar 80.2880% yang menjelaskan bahwa persentase kemungkinan variabel Persepsi Korupsi dapat dipengaruhi oleh infrastruktur telekomunikasi, layanan *online*, sumber daya manusia, kebebasan pers dan pembangunan manusia adalah sebesar 80.2880% dan 19.71200% sisanya tidak disebutkan dalam penelitian ini.

4.3.2 *Fixed Effect Model* (FEM)

Tabel 4. 3 Hasil FEM

Variable	Coefficient	Std.Error	t-statistic	Prob
TII	0.046358	0.040252	1.151692	0.25300
OSI	-0.002173	0.042783	-0.050783	0.95960
HCI	-0.337969	0.078218	-4.320874	0.00000
PFI	-0.011037	0.025855	-0.426902	0.67060
HDI	0.722265	0.235012	-0.590900	0.55630
R-squared	0.970490			
Adjusted R-squared	0.965193			

Sumber: data olahan *Eviews* 12 *SV*, 2024
Legend: TII: indeks infrastruktur telekomunikasi; OSI: indeks layanan *online*; HCI: Indeks sumber daya manusia; PFI: indeks kebebasan pers; HDI: indeks pembangunan manusia

Sedangkan hasil regresi data panel *Fixed Effect Model* (FEM) menunjukkan nilai *R-squared* sebesar 0.970490 atau sebesar 97.0490% yang menjelaskan bahwa persentase kemungkinan variabel Persepsi Korupsi dapat dipengaruhi oleh infrastruktur telekomunikasi, layanan *online*, sumber daya manusia, kebebasan pers dan pembangunan manusia adalah sebesar 97.0490% dan 2.9510% sisanya tidak disebutkan dalam penelitian ini. Sehingga FEM diasumsikan lebih realistis digunakan dibandingkan CEM.

4.3.3 Random Effect Model (REM)

Tabel 4. 4 Hasil REM

Variable	Coefficient	Std.Error	t-statistic	Prob
TII	-0.042137	0.036518	-1.253889	0.25170
OSI	0.046926	0.041125	1.141059	0.25700
HCI	-0.071596	0.061915	-1.156361	0.25070
PFI	0.001898	0.025743	0.073735	0.94140
HDI	0.878255	0.153393	5.725511	0.00000
R-squared	0.393611			
Adjusted R-squared	0.358761			

Sumber: data olahan *Eviews* 12 *SV*, 2024
Legend: TII: indeks infrastruktur telekomunikasi; OSI: indeks layanan *online*; HCI: Indeks sumber daya manusia; PFI: indeks kebebasan pers; HDI: indeks pembangunan manusia

Sedangkan hasil regresi data panel *Random Effect Model* (REM) menunjukkan nilai *R-squared* sebesar 0.393611 atau sebesar 39.3611% yang menjelaskan bahwa persentase kemungkinan variabel Persepsi Korupsi dapat dipengaruhi oleh infrastruktur telekomunikasi, layanan *online*, sumber daya manusia, kebebasan pers dan pembangunan manusia adalah sebesar 39.3611% dan 60.6389% sisanya tidak disebutkan dalam penelitian ini. Sehingga, memakai REM diasumsikan tidak realistis maka terpilih FEM.

4.4 Uji Estimasi Model

4.4.1 Uji Chow

Tabel 4. 5 Hasil Uji Chow

Effect Test	Statistic	d.f	Prob.
Cross-section F	49.22453	(9.78)	0.0000
Cross-section Chi-Square	176.6145	9	0.0000

Sumber: data olahan *Eviews* 12 *SV*, 2024

Tabel 4.4 menunjukkan nilai *Probability Crosssection Chi-square* sebesar 0.0000 < 0.05. Ini berarti H0 ditolak sehingga *Fixed Effect Model* (FEM) terpilih.

4.4.2 Uji Hausman

Tabel 4. 6 Hasil Uji Hausman

Effect Test	Statistic	d.f	Prob.
Cross-section Random	41.7852	5	0.0000

Sumber: data olahan *Eviews* 12 *SV*, 2024

Hasil Regresi data panel dengan *Fix Effect Model* (FEM) pada Tabel 4.5 menghasilkan nilai Prob 0.0000 < 0.05, maka *Fixed Effect Model* terpilih dan tidak perlu dilakukan uji *Lagrage-Multiplier* (LM).

4.5 Uji Asumsi Klasik

4.5.1 Uji Multikolinearitas

Tabel 4. 7 Hasil Uji Multikolinearitas

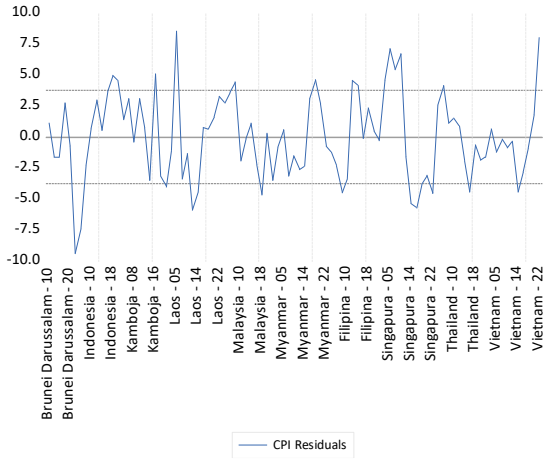
Variabel	TII	OSI	HCI	PFI	HDI
TII	1				
OSI	0.787701	1			
HCI	0.223681	0.558244	1		
PFI	-0.149213	-0.15312	0.089132	1	
HDI	0.794862	0.853209	0.567049	-0.16769	1

Sumber: data olahan *Eviews* 12 *SV*, 2024

Legend: TII: indeks infrastruktur telekomunikasi; OSI: indeks layanan *online*; HCI: Indeks sumberdaya manusia; PFI: indeks kebebasan pers; HDI: indeks pembangunan manusia

Data berdasarkan Tabel 4.6 disimpulkan bahwa tidak ada indikasi multikolinearitas karena semua nilai koefisien antar variabel kurang dari 0.9. Dapat disimpulkan bahwa variabel independen lolos uji multikolinearitas.

4.5.2 Uji Heteroskedasitas



Gambar 4. 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: data olahan *Eviews* 12 *SV*, 2024

Grafik residual berwarna biru tidak melewati batas 500 dan -500 sehingga dapat dinyatakan varian residual sama. Oleh karena itu, tidak terjadi gajala heteroskedastisitas.

4.6 Uji Hipotesis

4.6.1 Uji t

Tabel 4. 8 Hasil Uji t

Variable	Coefficient	t-statistic	Prob	Keterangan
C	0.722	3.604	0.001	
TII	0.046	1.152	0.253	H1 tidak didukung
OSI	-0.002	-0.051	0.960	H2 tidak didukung
HCI	-0.338	-4.321	0.000	H3 didukung
PFI	-0.011	-0.427	0.671	H4 tidak didukung
HDI	0.139	-0.591	0.556	H5 tidak didukung
R-squared	0.970	T table =	1.986	
Adjusted R-squared	0.965	F table =	2.316	

Sumber: data olahan *Eviews* 12 *SV*, 2024
Legend: TII: indeks infrastruktur telekomunikasi; OSI: indeks layanan *online*; HCI: Indeks sumberdaya manusia; PFI: indeks kebebasan pers; HDI: indeks pembangunan manusia

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat diinterpretasikan hasil uji t dengan dasar nilai *t-statistic* dan *probability* sebagai barikut:

a Hasil uji t pada variabel Indeks Infrastruktur Telekomunikasi terhadap Indeks Persepsi Korupsi memiliki nilai *t-statistic* sebesar 1.151692 dan nilai *probability* sebesar 0.2530 > 0.05, maka Ha ditolak dan H0 diterima, artinya variabel Infrastruktur Telekomunikasi tidak berpengaruh terhadap Indeks Persepsi Korupsi.

b Hasil uji t pada variabel Indeks Layanan *Online* terhadap Indeks Persepsi Korupsi memiliki nilai *t-statistic* sebesar -0.217262 dan nilai *probabilit*y

sebesar 0.9596 > 0.05, maka Ha ditolak dan H0 diterima, artinya variabel Layanan *Online* tidak berpengaruh terhadap Persepsi Korupsi.

c Hasil uji t pada variabel Indeks Sumber Daya Manusia terhadap Persepsi Korupsi memiliki nilai *t-statistic* sebesar -4.320874 dan nilai *probabilit*y sebesar 0.0000 < 0.05, maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya variabel Sumber Daya Manusia berpengaruh negatif signifikan terhadap Indeks Persepsi Korupsi.

d Hasil uji t pada variabel Indeks Kebebasan Pers terhadap Indeks Persepsi Korupsi memiliki nilai *t-statistic* sebesar -0.426902 dan nilai *probabilit*y sebesar 0.6706 > 0.05, maka Ha ditolak dan H0 diterima, artinya variabel *E-Government* tidak berpengaruh terhadap Persepsi Korupsi.

e Hasil uji t pada variabel Pembangunan Manusia terhadap Persepsi Korupsi memiliki nilai *t-statistic* sebesar -0.590900 dan nilai *probabilit*y sebesar 0.5563 < 0.05, maka H0 diterima dan Ha ditolak, artinya variabel Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh terhadap Indeks Persepsi Korupsi.

Berdasarkan pengujian tersebut, diperoleh juga persamaan regresi sebagai berikut:

CPI = 0.722 + 0.046TII - 0.002OSI - 0.338HCI - 0.011PFI - 0.139HDI

4.6.2 Uji F

Tabel 4. 9 Hasil Uji F

F-statistic	183.2264
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: data olahan *Eviews* 12 SV

Berdasarkan Tabel 4.9, dapat dilihat pada nilai *F-statistic* bernilai sebesar 183.2264 dan *Prob(F-statistic)* didapatkan nilai sebesar 0.00000 < 0.05, maka H0 ditolak dan H1 diterima yang berarti model penelitian ini layak digunakan.

4.6.3 Uji Koefisien Determinasi (R2)

Tabel 4. 10 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)

R-squared	0.970490
Adjusted R-squared	0.965193

Sumber: data olahan *Eviews* 12 *SV*, 2024

Nilai koefisien *Adjusted R-squared* sebesar 0.9655193 atau 96.5193% tersebut menunjukkan bahwa variabel independen Infrastruktur Telekomunikasi, Layanan *Online*, Sumber Daya Manusia, Kebebasan Pers dan Pembangunan Manusia mampu menjelaskan variabel Persepsi korupsi di negara Asia Tenggara sebesar 96.5193% sedangkan sisanya sebesar 3.480700% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

4.7 Pembahasan

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hanya aspek kualitas manusia (pendidikan) yang dapat mengurangi persepsi korupsi di negara Asia Tenggara. Pengukuran Kualitas manusia yang dibahas dalam Indeks Sumberdaya Manusia meliputi angka melek huruf orang dewasa, rasio partisipasi pendidikan, dan durasi pendidikan yang diharapkan dan rata-rata durasi pendidikan. Sedangkan aspek pembangunan infrastruktur telekomunikasi, layanan *online*, kebebasan pers dan pembangunan manusia tidak cukup untuk mempengaruhi persepsi korupsi di negara Asia Tenggara. Lebih lanjut, berikut merupakan pembahasan dari kelima variabel dalam penelitian ini :

4.7.1 Pengaruh Indeks Infrastruktur Telekomunikasi terhadap Indeks Persepsi Korupsi

Dari olah data uji t pada Tabel 4.7 dapat dilihat bahwa nilai koefisien variabel Indeks Infrastruktur Telekomunikasi 0.046 dan Prob 0.253 (> 0,05) sehingga variabel TII tidak berpengaruh terhadap Indeks Persepsi Korupsi di Asia Tenggara. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor seperti akses teknologi telekomunikasi dan akses internet yang tidak merata. Akses tersebut masih terbatas di daerah perkotaan dan sementara daerah pedesaan maupun daerah terpencil belum seluruhnya mendapatkan akses. Ketidakmerataan ini menyebabkan perbedaan signifikan dalam akses informasi sehingga kurangnya transparansi dari pemerintah setempat dapat mempengaruhi kurangnya kontrol sosial yang dapat membantu mengurangi korupsi, maka dari itu pengimplementasian teori agensi yang mengacu kepada hubungan antara agen dan

prinsipal yang seharusnya saling memiliki akses informasi yang transparan, tidak cukup efektif dalam konteks ini.

Dana pembangunan infrastruktur telekomunikasi juga kerap dikorupsi oleh oknum pejabat yang tidak bertanggungjawab seperti kasus proyek NBN-ZTE yang dilakukan oleh pejabat dibawah naungan mantan presiden filipina yaitu Gloria Macapagal-Arroyo pada tahun 2007. Hasil penelitian ini sejalan dengan Seiam dan Salman (2024) bahwa faktor infrastruktur telekomunikasi tidak berpengaruh terhadap persepsi korupsi di negara-negara berkembang.

4.7.2 Pengaruh Indeks Layanan Online terhadap Indeks Persepsi Korupsi

Dari olah data uji t pada Tabel 4.7 dapat dilihat bahwa koefisien variabel Indeks Layanan *Online* adalah -0.002 dan Prob 0.960 (> 0.05) maka variabel OSI tidak berpengaruh terhadap Indeks Persepsi Korupsi di Asia Tenggara. Hal ini kemungkinan karena kurangnya informasi yang disediakan dan kurangnya keterlibatan dalam menjalankan sistem layanan informasi pemerintah seperti *E-Government* dan portal layanan publik dapat menjadi hambatan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Salah satu aspek penting dari teori agensi adalah membahas adanya asimetri informasi, di mana agen memiliki informasi lebih banyak dan lebih mendalam daripada prinsipal, yang sering mengakibatkan ketidakefisienan dan potensi penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, pentingnya keterlibatan masyarakat lebih dalam dalam fase *E-Government* yang lebih tinggi, seperti fase transaksi dan transformasi, agar terjadi kesamarataan informasi sehingga dapat

meningkatkan pelayanan publik dan mengurangi korupsi. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan Silal *et al*. (2023) dan Prasad dan Shivarajan (2015) yang menyatakan bahwa tanpa kemampuan untuk memanfaatkan teknologi, masyarakat maupun pemerintah tidak dapat sepenuhnya mengambil keuntungan dari transparansi dan akuntabilitas yang ditawarkan oleh layanan *online*. Literasi digital yang rendah juga memperkuat ketergantungan pada metode tradisional yang rentan terhadap korupsi.

4.7.3 Pengaruh Indeks Sumber Daya Manusia terhadap Indeks Persepsi Korupsi

Dari olah data uji t pada Tabel 4.7 dapat dilihat bahwa koefisien variabel Indeks Sumber Daya Manusia -0.338 dan Prob 0.000 (< 0.05) sehingga variabel HCI berpengaruh negatif signifikan terhadap Indeks Persepsi Korupsi di Asia Tenggara. Hal ini kemungkinan disebabkan karena asumsi sumber daya manusia yang terdidik dan terlatih dengan baik cenderung lebih memahami pentingnya tata kelola yang baik dalam pemerintahan. Mereka dapat memainkan peran aktif dalam mempromosikan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam lembaga-lembaga publik. SDM yang terampil mampu mengidentifikasi dan menghadapi praktik korupsi, serta membangun sistem pengawasan yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Selain itu, pendidikan dan pelatihan yang baik menanamkan nilai-nilai etis dan moral yang tinggi, menciptakan budaya kerja yang menolak korupsi. Semua faktor ini bersama-sama menciptakan lingkungan yang tidak mendukung korupsi, sehingga meningkatkan nilai CPI dan mencerminkan tingkat korupsi yang lebih rendah. Hal ini sejalan dengan Martins *et al*. (2018) dalam penelitiannya

menyatakan bahwa Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Indeks Persepsi Korupsi.

4.7.4 Pengaruh Indeks Kebebasan Pers terhadap Indeks Persepsi Korupsi

Dari olah data uji t pada Tabel 4.7 dapat dilihat bahwa variabel Indeks Kebebasan Pers dengan nilai koefisien -0.011 dan Prob 0.671 berarti variabel PFI tidak berpengaruh terhadap Indeks Persepsi Korupsi di Asia Tenggara. Kemungkinan penyebabnya karena sebagian besar negara di ASEAN menghadapi kendala struktural yang menghambat efektivitas media dalam melawan korupsi. Meskipun kebebasan pers secara formal ada, praktik intimidasi terhadap jurnalis masih sering terjadi, sehingga media tidak dapat berfungsi dengan bebas dan independen. Kedua, korupsi yang mengakar dalam birokrasi dan sektor politik membuat media sulit untuk mengungkap kasus. Ketiga, kelemahan dalam budaya hukum dan kurangnya dukungan institusional untuk perlindungan jurnalis juga menjadi kendala sehingga masih adanya asimetri informasi dan konflik kepentingan yang dibahas dalam teori agensi. Dalam penelitian Wei *et al.* (2017) mendukung bahwa peran Kebebasan Pers di negara berkembang tidak berpengaruh terhadap persepsi korupsi karena supremasi hukum tidak cukup kuat untuk mengimbangi kebebasan pers untuk memberikan efek menurunkan angka korupsi.

4.7.5 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Persepsi Korupsi

Dari olah data uji t pada Tabel 4.7 dapat dilihat bahwa koefisien variabel Indeks Pembangunan Manusia adalah 0.722 dan nilai Prob 0.556 sehingga variabel HDI tidak berpengaruh terhadap Persepsi Korupsi di Asia Tenggara. Dalam pembahasannya, pembangunan manusia mencakup aspek-aspek seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup . Harapan hidup yang tinggi bisa dicapai melalui layanan kesehatan yang lebih baik, tetapi korupsi sering kali terjadi justru di sektor ini. Di negara-negara berkembang, korupsi di sektor layanan kesehatan, seperti pengadaan alat medis atau distribusi obat-obatan, sering terjadi.

Aspek pendukung IPM seperti pendidikan berkualitas secara teori dapat meningkatkan kesadaran warga tentang hak-hak mereka dan meningkatkan partisipasi publik dalam menuntut tata kelola pemerintahan yang bersih. Namun, dalam praktiknya di banyak negara berkembang, peningkatan tingkat pendidikan belum selalu diiringi dengan pengurangan korupsi atau perubahan signifikan dalam persepsi korupsi. Hal ini karena faktor-faktor seperti budaya sistem *gratifikasi* ataupun *bribery* dalam instansi pendidikan. Pendidikan yang lebih baik mungkin meningkatkan pengetahuan tentang adanya korupsi, tetapi itu tidak selalu berarti ada perubahan nyata dalam tindakan terhadap korupsi.

Pengaruh lainnya seperti kecilnya insentif maupun bantuan ekonomi yang diterima oleh masyarakat sering kali dapat memotivasi perilaku koruptif. Penelitian ini didukung oleh Gurrib (2015) yang menyatakan bahwa perubahan pada IPM tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan perubahan, baik peningkatan maupun penurunan persepsi korupsi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh Infrastruktur Telekomunikasi, Layanan *Online*, Sumber Daya Manusia, Kebebasan Pers dan Pembangunan Manusia terhadap Persepsi Korupsi di 10 negara Asia Tenggara pada tahun 2003-2022. Menurut hasil pengujian penelitian yang telah dilakukan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Indeks Infrastruktur Telekomunikasi tidak berpengaruh terhadap Indeks Persepsi Korupsi di Asia Tenggara. Hal ini berdasarkan pada hasil uji t yang menunjukkan signifikansi sebesar 0.253 (> 0.05). Artinya, pembangunan infrastruktur telekomunikasi tidak berpengaruh terhadap penurunan persepsi korupsi di Asia Tenggara.
2. Indeks Layanan *Online* tidak berpengaruh terhadap Indeks Persepsi Korupsi di Asia Tenggara. Hal ini berdasarkan pada hasil uji t yang menunjukkan signifikansi sebesar 0.960 (>0.05). Dengan demikian, pengembangan layanan *online* pemerintah tidak cukup mempengaruhi penurunan persepsi korupsi di Asia Tenggara.
3. Indeks Sumber Daya Manusia berpengaruh negatif signifikan terhadap Indeks Persepsi Korupsi di Asia Tenggara. Hal ini berdasarkan pada hasil uji t yang menunjukkan signifikansi sebesar 0.000 (< 0.05). Artinya, sumber daya manusia yang berkualitas dapat menurunkan angka persepsi korupsi di Asia Tenggara.

4. Indeks Kebebasan Pers tidak berpengaruh terhadap Indeks Persepsi Korupsi di Asia Tenggara. Hal ini berdasarkan pada hasil uji t yang menunjukkan signifikansi sebesar 0.011 (> 0.05). Artinya, peningkatan kebebasan pers dalam meliput berita tidak cukup mempengaruhi penurunan persepsi korupsi di Asia Tenggara.
5. Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh terhadap Indeks Persepsi Korupsi di Asia Tenggara. Hal ini berdasarkan pada hasil uji t yang menunjukkan signifikansi sebesar 0.556 (> 0.05). Artinya, peningkatan usaha pembangunan manusia tidak cukup mempengaruhi penurunan persepsi korupsi di Asia Tenggara.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Terdapat keterbatasan dalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi hasil penelitian, keterbatasan tersebut antara lain:

1. Data yang tersedia untuk meneliti secara lengkap pada Indeks Persepsi Korupsi terbatas karena adanya negara yang tidak mengikuti survei lebih dari tiga tahun.

5.3 Saran

Dalam penelitian ini, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya:

1. Untuk Mahasiswa

Menggunakan variabel-variabel potensial lain seperti ukuran pemerintahan, rasio anggaran, dan kualitas audit serta menambahkan perbandingan negara maju dan berkembang.

2. Untuk Institusi Pemerintah

Saran untuk meningkatkan pengawasan internal dan eksternal, kebijakan dan regulasi, transparansi informasi melalui website pemerintah daerah, serta melakukan reformasi birokrasi. Dengan begitu diharapkan terjadinya efektivitas dan akuntabilitas tata kelola.

3. Untuk Masyarakat

Diharapkan untuk mengetahui apakah pemerintah daerah sudah menjadikan transparansi informasi sebagai prioritas di situs resmi pemerintah daerah. Masyarakat dapat mengkaji serta terlibat dengan informasi tersedia yang merupakan komponen dari tata kelola yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Alves, A., Costa Curta, L., Da Dias, L., Francisco Alves, A., Costa Curta, L., & Da Silva Dias, L. (2017). *Analysis Of Correlation Among HDI (Human Development Index), Violence And Corruption Perceptions Index*. Https://Www.Researchgate.Net/Publication/317281178

Boufounou, P., Eriotis, N., Kounadeas, T., Argyropoulos, P., & Poulopoulos, J. (2024). Enhancing Internal Control Mechanisms In Local Government Organizations: A Crucial Step Towards Mitigating Corruption And Ensuring Economic Development. *Economies*, *12*(4). Https://Doi.Org/10.3390/Economies12040078

Cataldo, M. Di, & Mastrorocco, N. (2022). Organized Crime, Captured Politicians, And The Allocation Of Public Resources. *Journal Of Law, Economics, And Organization*, *38*(3), 774–839. Https://Doi.Org/10.1093/Jleo/Ewab015

Chandra, A. H., Isfahani, N. R., & Widodo, E. (2019). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kriminalitas Di Indonesia Tahun 2011-2016 Dengan Regresi Data Panel*.

Ericson, O. (2017). *Corruption Of The Press-A Cross Country Panel Data Study Of Corruption, Press Freedom And The Perceptions Of Press Freedom*.

Flavin, P., & Montgomery, F. (2020). Freedom Of The Press And Perceptions About Government Corruption. *International Political Science Review*, *41*(4), 554–566. Https://Doi.Org/10.1177/0192512119858469

Gabriel, A., & Wellington, P. (2022). An Empirical Analysis Of Anti-Corruption Efforts, Public Perception Of Corruption And Government Credibility In Nigeria. *International Journal Of Science And Research*. Https://Doi.Org/10.21275/Sr22531154926

Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 21* (7th Ed., Vol. 7). Universitas Diponegoro.

Gorsira, M., Denkers, A., & Huisman, W. (2018). Both Sides Of The Coin: Motives For Corruption Among Public Officials And Business Employees. *Journal Of Business Ethics*, *151*(1), 179–194. Https://Doi.Org/10.1007/S10551-016-3219-2

Gurrib, I. (2015). The Relationship Between The Inequality-Adjusted *Human Development Index* And The Corruption Perceptions Index In Gulf Cooperation Council (Gcc) Major Economies. In *The Political Economy Of*

Wasta: Use And Abuse Of Social Capital Networking (Pp. 47–61). Springer International Publishing. Https://Doi.Org/10.1007/978-3-319-22201-4

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. In *Journal Of Financial Economics* (Vol. 3). Q North-Holland Publishing Company.

Juliandi, A., Irfan, & Manurung, S. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis, Konsep Dan Aplikasi: Sukses Menulis Skripsi & Tesis Mandiri*. Umsu Press.

Kalesnikaite, V., Neshkova, M. I., & Ganapati, S. (2023). Parsing The Impact Of *E-Government* On Bureaucratic Corruption. *Governance*, *36*(3), 827–842. Https://Doi.Org/10.1111/Gove.12707

Kurniawan, B., Kusdiana, D., Suryaman, R., & Priadana, M. (2023, December 18). *The Influence Of Macroeconomic Factors And Corruption On Human Development In Asean-7*. Https://Doi.Org/10.4108/Eai.13-9-2023.2341207

Kurniawan, Y., Ratnasari, R. T., & Mustika, H. (2020). The Corruption And Human Development To The Economic Growth Of Oic Countries. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal Of Islamic Economics And Business)*, *6*(2), 189. Https://Doi.Org/10.20473/Jebis.V6i2.20472

Lidya, D., Lembaga, N., Berita, K., & Antara, N. (2019). Media Massa Dan Pemberitaan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, *5*(2), 57–73. Https://Doi.Org/10.32697/Integritas.V5i2.472

Maria, E., Kristen, U., Wacana, S., & Halim, A. (2017). *Ekuitas: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan E-Government Dan Korupsi: Studi Di Pemerintah Daerah, Indonesia Dari Perspektif Teori Keagenan*. Https://Doi.Org/10.24034/J25485024.Y2021.V5.I1.4789

Martins, J., Fernandes, B., Rohman, I., & Veiga, L. (2018). The War On Corruption: The Role Of Electronic Government. *Lecture Notes In Computer Science (Including Subseries Lecture Notes In Artificial Intelligence And Lecture Notes In Bioinformatics)*, *11020 Lncs*, 98–109. Https://Doi.Org/10.1007/978-3-319-98690-6_9

Nam, T. (2018a). Examining The Anti-Corruption Effect Of *E-Government* And The Moderating Effect Of National Culture: A Cross-Country Study. *Government Information Quarterly*, *35*(2), 273–282. Https://Doi.Org/10.1016/J.Giq.2018.01.005

Nam, T. (2018b). Examining The Anti-Corruption Effect Of *E-Government* And The Moderating Effect Of National Culture: A Cross-Country Study. *Government Information Quarterly*, *35*(2), 273–282. Https://Doi.Org/10.1016/J.Giq.2018.01.005

Nani. (2022). *Step By Step Analisis Regresi Data Panel Menggunakan Eviews* (E. G. Ahmad & A. Nurcahyani, Eds.). Visi Intelegensia.

Napitupulu, R. B., Simanjuntak, T. P., Hutabarat, L., Damanik, H., Harianja, H., Sirait, R. T. M., & Tobing, C. E. R. L. (2021). *Penelitian Bisnis Teknik Dan Analisa Data Dengan SPSS-STATA-Eviews* (1st Ed.). Madenatera.

Park, C. H., & Kim, K. (2020). *E-Government* As An Anti-Corruption Tool: Panel Data Analysis Across Countries. *International Review Of Administrative Sciences*, *86*(4), 691–707. Https://Doi.Org/10.1177/0020852318822055

Prasad, A., & Shivarajan, S. (2015). Understanding The Role Of Technology In Reducing Corruption: A Transaction Cost Approach. *Journal Of Public Affairs*, *15*(1), 19–36. Https://Doi.Org/10.1002/Pa.1484

Purwanto. (2019). *Panduan Praktis Untuk Penelitian Ekonomi Syariah* (A. Saifudin, Ed.; 1st Ed.). STAI Al Husain.

Reporters Without Borders. (2024). *Methodology Used For Compiling The World Press Freedom Index 2024*. Https://Rsf.Org/En/Methodology-Used-Compiling-World-Press-Freedom-Index-2024?Year=2024&Data_Type=General

Sarabia, M., Crecente, F., Del Val, M. T., & Giménez, M. (2020). The *Human Development Index* (HDI) And The Corruption Perception Index (CPI) 2013-2017: Analysis Of Social Conflict And Populism In Europe. *Economic Research-Ekonomska Istrazivanja* , *33*(1), 2943–2955. Https://Doi.Org/10.1080/1331677X.2019.1697721

Seiam, D. A., & Salman, D. (2024). Examining The Global Influence Of E-Governance On Corruption: A Panel Data Analysis. *Future Business Journal*, *10*(1). Https://Doi.Org/10.1186/S43093-024-00319-3

Setyobudi, C. R., & Setyaningrum, D. (2019). *E-Government* And Corruption Perception Index: A Cross-Country Study. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, *23*(1). Https://Doi.Org/10.20885/Jaai.Vol23

Silal, P., Jha, A., & Saha, D. (2023). Examining The Role Of *E-Government* In Controlling Corruption: A Longitudinal Study. *Information And Management*, *60*(1). Https://Doi.Org/10.1016/J.Im.2022.103735

Starke, C., Naab, T. K., & Scherer, H. (2016). Free To Expose Corruption: The Impact Of Media Freedom, Internet Access, And Governmental *Online* Service Delivery On Corruption. In *International Journal Of Communication* (Vol. 10). Http://Ijoc.Org.

Sugiharti, L., Purwono, R., Esquivias, M. A., & Rohmawati, H. (2023). The Nexus Between Crime Rates, Poverty, And Income Inequality: A Case Study

Of Indonesia. *Economies*, *11*(2). Https://Doi.Org/10.3390/Economies11020062

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.

Transparency International. (2023). *Corruption Perceptions Index*. Https://Www.Transparency.Org/En/Cpi/2023

United Nation. (2020). *E-Government Survey 2020 Digital Government In The Decade Of Action For Sustainable Development With Addendum On COVID-19 Response*.

Venkatesh, V., Thong, J. Y. L., Chan, F. K. Y., & Hu, P. J. H. (2016). Managing Citizens' Uncertainty In *E-Government* Services: The Mediating And Moderating Roles Of Transparency And Trust. *Information Systems Research*, *27*(1), 87–111. Https://Doi.Org/10.1287/Isre.2015.0612

Wei, C. Z., Hui, H. M., & Law, L. G. (2017). *The Impact Of Rule Of Law And Press Freedom On Corruption: Conditionality Matters*.

Yulianingsih, E., Panjaitan, F., Silvana, D., & Informasi, S. (2022). Evaluasi Implementasi *E-Government* Menggunakan Metode Pemeringkatan *E-Government* Indonesia (PEGI). In *Journal Of Information Technology Ampera* (Vol. 3, Issue 2). Https://Journal-Computing.Org/Index.Php/Journal-Ita/Index

Yuliyana, I., & Setyaningrum, D. (2016). *Pengaruh Penerapan E-Government Dan Akuntabilitas Terhadap Persepsi Korupsi Di Kementrian/Lembaga*.

Zhao, H., Ahn, M. J., & Manoharan, A. P. (2021). *E-Government*, Corruption Reduction And The Role Of Culture: A Study Based On Panel Data Of 57 Countries. *International Journal Of E-Planning Research*, *10*(3), 86–104. Https://Doi.Org/10.4018/IJEPR.20210701.Oa6

LAMPIRAN

Lampiran 1 - Data Panel Penelitian

No.	Negara	Tahun	CPI	TII	OSI	HCI	PFI	HDI
1	Brunei Darussalam	2004	N/A	0.233	0.266	0.890	N/A	0.807
	Brunei Darussalam	2005	N/A	0.226	0.246	0.870	N/A	0.811
	Brunei Darussalam	2008	N/A	0.265	0.264	0.877	N/A	0.821
	Brunei Darussalam	2010	55	0.270	0.283	0.892	51	0.825
	Brunei Darussalam	2012	55	0.455	0.595	0.825	64.55	0.836
	Brunei Darussalam	2014	N/A	0.369	0.362	0.782	64.55	0.834
	Brunei Darussalam	2016	58	0.351	0.507	0.731	46.15	0.830
	Brunei Darussalam	2018	63	0.607	0.722	0.748	48.52	0.826
	Brunei Darussalam	2020	60	0.821	0.635	0.761	50.35	0.827
	Brunei Darussalam	2022	N/A	0.837	0.587	0.757	42.53	0.823
2	Indonesia	2004	20	0.048	0.324	0.800	37.75	0.621
	Indonesia	2005	22	0.049	0.296	0.800	26	0.634
	Indonesia	2008	26	0.070	0.334	0.830	27	0.649
	Indonesia	2010	28	0.114	0.244	0.854	35.83	0.667
	Indonesia	2012	32	0.190	0.497	0.798	58.95	0.682
	Indonesia	2014	34	0.305	0.362	0.679	61.85	0.690
	Indonesia	2016	37	0.302	0.362	0.680	58.28	0.701
	Indonesia	2018	38	0.322	0.569	0.686	60.32	0.712
	Indonesia	2020	37	0.567	0.682	0.734	63.18	0.712
	Indonesia	2022	34	0.640	0.764	0.744	49.27	0.713
3	Kamboja	2004	N/A	0.005	0.212	0.640	36.5	0.499
	Kamboja	2005	23	0.006	0.231	0.660	23	0.510
	Kamboja	2008	18	0.020	0.197	0.691	35.5	0.536
	Kamboja	2010	21	0.030	0.137	0.702	43.83	0.542
	Kamboja	2012	22	0.081	0.190	0.600	58.19	0.551
	Kamboja	2014	21	0.207	0.173	0.519	59.03	0.559
	Kamboja	2016	31	0.249	0.051	0.478	59.3	0.573
	Kamboja	2018	20	0.313	0.250	0.563	54.1	0.588
	Kamboja	2020	21	0.547	0.453	0.534	54.54	0.596
	Kamboja	2022	24	0.561	0.418	0.538	43.48	0.600
4	Laos	2004	N/A	0.011	0.058	0.630	64.33	0.506
	Laos	2005	33	0.007	0.079	0.640	66.5	0.516
	Laos	2008	20	0.021	0.037	0.663	70	0.539
	Laos	2010	21	0.033	0.079	0.684	80.5	0.557
	Laos	2012	21	0.100	0.216	0.565	32.01	0.578
	Laos	2014	25	0.162	0.142	0.494	28.78	0.597
	Laos	2016	30	0.154	0.283	0.491	28.42	0.610

	Laos	2018	29	0.225	0.167	0.525	33.59	0.613
	Laos	2020	29	0.238	0.194	0.554	35.72	0.616
	Laos	2022	31	0.282	0.301	0.547	36.64	0.620
5	Malaysia	2004	50	0.302	0.490	0.830	39.83	0.731
	Malaysia	2005	51	0.305	0.577	0.830	33	0.728
	Malaysia	2008	51	0.302	0.676	0.839	39.5	0.754
	Malaysia	2010	44	0.344	0.632	0.854	50.75	0.768
	Malaysia	2012	49	0.451	0.791	0.769	57.27	0.777
	Malaysia	2014	52	0.445	0.677	0.712	57.27	0.787
	Malaysia	2016	49	0.440	0.717	0.695	53.43	0.798
	Malaysia	2018	47	0.565	0.889	0.699	52.59	0.802
	Malaysia	2020	51	0.763	0.853	0.751	66.88	0.802
	Malaysia	2022	47	0.795	0.763	0.765	51.55	0.807
6	Myanmar	2004	17	0.004	0.185	0.720	100	0.445
	Myanmar	2005	18	0.004	0.154	0.730	88.83	0.456
	Myanmar	2008	13	0.004	0.114	0.764	94.38	0.461
	Myanmar	2010	14	0.004	0.083	0.764	94.5	0.506
	Myanmar	2012	15	0.000	0.105	0.706	55.29	0.526
	Myanmar	2014	21	0.008	0.024	0.529	58.57	0.548
	Myanmar	2016	28	0.066	0.159	0.484	54.52	0.567
	Myanmar	2018	29	0.257	0.229	0.513	56.85	0.595
	Myanmar	2020	28	0.523	0.259	0.513	55.23	0.615
	Myanmar	2022	23	0.608	0.307	0.583	25.03	0.608
7	Filipina	2004	26	0.087	0.591	0.900	36.63	0.658
	Filipina	2005	25	0.084	0.742	0.890	50	0.659
	Filipina	2008	23	0.101	0.512	0.888	45	0.666
	Filipina	2010	24	0.112	0.394	0.888	60	0.673
	Filipina	2012	34	0.208	0.497	0.834	56.89	0.684
	Filipina	2014	38	0.245	0.480	0.705	56.31	0.693
	Filipina	2016	35	0.379	0.667	0.684	55.34	0.696
	Filipina	2018	36	0.355	0.882	0.717	57.47	0.706
	Filipina	2020	34	0.584	0.729	0.754	56.46	0.705
	Filipina	2022	33	0.564	0.630	0.763	41.84	0.710
8	Singapura	2004	93	0.663	0.969	0.870	57	0.886
	Singapura	2005	94	0.645	0.996	0.910	50.67	0.896
	Singapura	2008	92	0.585	0.612	0.908	49	0.910
	Singapura	2010	93	0.639	0.686	0.920	47.5	0.921
	Singapura	2012	87	0.692	1.000	0.850	56.57	0.926
	Singapura	2014	84	0.879	0.992	0.852	55.71	0.932
	Singapura	2016	84	0.841	0.971	0.836	47.04	0.937
	Singapura	2018	85	0.802	0.986	0.856	49.05	0.942
	Singapura	2020	85	0.890	0.965	0.890	44.77	0.942
	Singapura	2022	83	0.876	0.962	0.902	44.23	0.949

9	Thailand	2004	36	0.116	0.533	0.880	14	0.707
	Thailand	2005	38	0.130	0.665	0.860	28	0.715
	Thailand	2008	35	0.151	0.505	0.853	34.5	0.735
	Thailand	2010	35	0.639	0.686	0.920	56.83	0.743
	Thailand	2012	37	0.236	0.510	0.782	61.4	0.752
	Thailand	2014	38	0.284	0.441	0.664	62.06	0.785
	Thailand	2016	35	0.412	0.551	0.694	55.47	0.793
	Thailand	2018	36	0.534	0.639	0.790	55.69	0.796
	Thailand	2020	36	0.700	0.794	0.775	55.06	0.800
	Thailand	2022	36	0.734	0.776	0.788	50.15	0.803
10	Vietnam	2004	26	0.116	0.533	0.880	86.88	0.637
	Vietnam	2005	26	0.049	0.223	0.820	73.25	0.645
	Vietnam	2008	27	0.108	0.445	0.815	86.17	0.665
	Vietnam	2010	27	0.226	0.305	0.810	75.75	0.676
	Vietnam	2012	31	0.397	0.425	0.743	28.22	0.684
	Vietnam	2014	31	0.379	0.417	0.615	27.64	0.693
	Vietnam	2016	33	0.371	0.572	0.599	25.73	0.702
	Vietnam	2018	33	0.389	0.736	0.654	24.95	0.711
	Vietnam	2020	36	0.669	0.653	0.678	25.29	0.726
	Vietnam	2022	42	0.697	0.648	0.690	26.11	0.726

Lampiran 2 – Data tabulasi *EViews* 12 *SV*

2.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	OSI	TII	HCI	PFI	HDI	CPI
Mean	0.492228	0.345215	0.733195	0.509466	0.697763	0.386882
Median	0.505010	0.302350	0.748000	0.525900	0.696000	0.340000
Maximum	1.000000	0.889900	0.920330	1.000000	0.949000	0.940000
Minimum	0.023620	0.000000	0.478470	0.140000	0.445000	0.130000
Std. Dev.	0.270842	0.261040	0.123213	0.171665	0.121947	0.203240
Skewness	0.125564	0.417536	-0.441700	0.473933	0.196803	1.429562
Kurtosis	2.028325	2.019117	2.211783	3.464942	2.510151	4.260482
Jarque-Bera	3.902966	6.430466	5.431524	4.319157	1.530149	37.83318
Probability	0.142063	0.040146	0.066155	0.115374	0.465299	0.000000
Sum	45.77724	32.10495	68.18709	47.38030	64.89200	35.98000
Sum Sq. Dev.	6.748690	6.269038	1.396698	2.711127	1.368141	3.800196
Observations	93	93	93	93	93	93

2.2 Hasil uji Common Effect Model

Dependent Variable: CPI
Method: Panel Least Squares
Date: 07/17/24 Time: 12:24
Sample: 2004 2022
Periods included: 10
Cross-sections included: 10
Total panel (unbalanced) observations: 93

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
TII	0.056472	0.079073	0.714168	0.4770
OSI	-0.102637	0.082495	-1.244165	0.2168
HCI	-0.000171	0.121092	-0.001409	0.9989
PFI	0.079921	0.059608	1.340781	0.1835
HDI	1.606804	0.188402	8.528603	0.0000
C	-0.743853	0.098435	-7.556825	0.0000

R-squared	0.802880	Mean dependent var	0.386882
Adjusted R-squared	0.791552	S.D. dependent var	0.203240
S.E. of regression	0.092792	Akaike info criterion	-1.854582
Sum squared resid	0.749094	Schwarz criterion	-1.691188
Log likelihood	92.23804	Hannan-Quinn criter.	-1.788608
F-statistic	70.87122	Durbin-Watson stat	0.241362
Prob(F-statistic)	0.000000		

2.3 Hasil Uji Fixed Effect Model

Dependent Variable: CPI
Method: Panel Least Squares
Date: 07/17/24 Time: 14:11
Sample: 2004 2022
Periods included: 10
Cross-sections included: 10
Total panel (unbalanced) observations: 93

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.722265	0.200410	3.603937	0.0006
TII	0.046358	0.040252	1.151692	0.2530
OSI	-0.002173	0.042783	-0.050783	0.9596
HCI	-0.337969	0.078218	-4.320874	0.0000
PFI	-0.011037	0.025855	-0.426902	0.6706
HDI	-0.138869	0.235012	-0.590900	0.5563

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.970490	Mean dependent var	0.386882
Adjusted R-squared	0.965193	S.D. dependent var	0.203240
S.E. of regression	0.037918	Akaike info criterion	-3.560114
Sum squared resid	0.112144	Schwarz criterion	-3.151630
Log likelihood	180.5453	Hannan-Quinn criter.	-3.395180
F-statistic	183.2264	Durbin-Watson stat	0.998843
Prob(F-statistic)	0.000000		

2.4 Hasil Uji Random Effect Model

Dependent Variable: CPI
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 07/17/24 Time: 12:25
Sample: 2004 2022
Periods included: 10
Cross-sections included: 10
Total panel (unbalanced) observations: 93
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
TII	-0.042137	0.036518	-1.153889	0.2517
OSI	0.046926	0.041125	1.141059	0.2570
HCI	-0.071596	0.061915	-1.156361	0.2507
PFI	0.001898	0.025743	0.073735	0.9414
HDI	0.878255	0.153393	5.725511	0.0000
C	-0.179492	0.124007	-1.447436	0.1514

Effects Specification

	S.D.	Rho
Cross-section random	0.069583	0.7710
Idiosyncratic random	0.037918	0.2290

Weighted Statistics

R-squared	0.393611	Mean dependent var	0.068216
Adjusted R-squared	0.358761	S.D. dependent var	0.057590
S.E. of regression	0.045207	Sum squared resid	0.177802
F-statistic	11.29444	Durbin-Watson stat	0.717692
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.646871	Mean dependent var	0.386882
Sum squared resid	1.341960	Durbin-Watson stat	0.095090

2.4 Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	49.224530	(9,78)	0.0000
Cross-section Chi-square	176.614540	9	0.0000

2.5 Hasil Uji Hausman

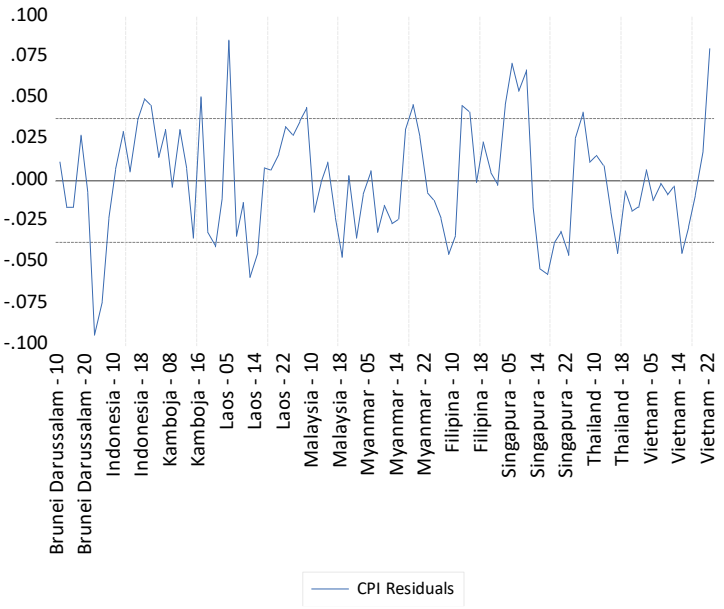
Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	41.785201	5	0.0000

2.6 Hasil Uji Multikolinesritas

	TII	OSI	HCI	PFI	HDI
TII	1.000000	0.787701	0.223631	-0.149213	0.794862
OSI	0.787701	1.000000	0.558244	-0.153123	0.853209
HCI	0.223631	0.558244	1.000000	0.089132	0.567049
PFI	-0.149213	-0.153123	0.089132	1.000000	-0.167685
HDI	0.794862	0.853209	0.567049	-0.167685	1.000000

2.7 Hasil Uji Heteroskedasitas



2.8 Hasil Uji T (Fixed Effect Model)

Dependent Variable: CPI
Method: Panel Least Squares
Date: 07/17/24 Time: 14:11
Sample: 2004 2022
Periods included: 10
Cross-sections included: 10
Total panel (unbalanced) observations: 93

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.722265	0.200410	3.603937	0.0006
TII	0.046358	0.040252	1.151692	0.2530
OSI	-0.002173	0.042783	-0.050783	0.9596
HCI	-0.337969	0.078218	-4.320874	0.0000
PFI	-0.011037	0.025855	-0.426902	0.6706
HDI	-0.138869	0.235012	-0.590900	0.5563

2.9 Hasil Uji F (Fixed Effect Model)

R-squared	0.970490	Mean dependent var	0.386882
Adjusted R-squared	0.965193	S.D. dependent var	0.203240
S.E. of regression	0.037918	Akaike info criterion	-3.560114
Sum squared resid	0.112144	Schwarz criterion	-3.151630
Log likelihood	180.5453	Hannan-Quinn criter.	-3.395180
F-statistic	183.2264	Durbin-Watson stat	0.998843
Prob(F-statistic)	0.000000		